



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



LAPORAN
TAHUNAN
**DIREKTORAT
JENDERAL
KEKAYAAN
INTELEKTUAL**
TAHUN 2019







Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.

Kata Pengantar

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan izin-Nya Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 2019 yang merupakan refleksi kegiatan dan pencapaian kinerja DJKI selama tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik dan diterbitkan serta disajikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia.

Penyelesaian permohonan kekayaan intelektual pada tahun 2019 belum memenuhi target, yaitu sebesar 70,31% penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah total permohonan layanan kekayaan intelektual sebesar 161.553 permohonan. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya fokus dan komitmen dari Direktorat Jenderal untuk menyelesaikan tunggakan penyelesaian permohonan kekayaan intelektual paten dan merek yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga 2019. Langkah penyelesaian tunggakan permohonan ini akan selesai di pertengahan tahun 2020, dan proses penyelesaian permohonan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya meminimalisir adanya backlog pada setiap tahapan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

membangun sistem teknologi informasi dalam tahapan penyelesaiannya.

Sebagai bentuk komitmen dalam penegakan hukum kekayaan intelektual, pada tahun 2019 ini DJKI memberikan inovasi pelayanan dengan pengembangan sistem pengaduan pelanggaran KI secara online “E-PENGADUAN”. Capaian dari indikator program ‘menyelesaikan pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku’ adalah 119,51% dari 41 aduan yang masuk dan telah ditangani (dengan catatan 3 aduan masuk tidak dilengkapi informasi pelapor dan terlapor). Persentase ini melebihi target indikator yaitu menangani 80% dari pengaduan yang masuk di tahun 2019.

Adapun realisasi pemanfaatan sistem informasi layanan kekayaan intelektual adalah 127.854 dari total pengguna layanan kekayaan intelektual 161.549 pengguna (79,14%). Realisasi kinerja ini didukung atas adanya inovasi pelayanan khususnya permohonan kekayaan intelektual pada beberapa lini layanan yaitu:

- a. Pelayanan Publik, melalui: Hak Cipta online; IPROLine Merek Online; IPROLine Paten Online; IPROLine Desain Industri Online; Indikasi Geografis Online; Sipengadu – layanan aduan atas layanan publik kekayaan intelektual;
- b. Pengaduan Pelanggaran KI, melalui E- Pengaduan – pengaduan.dgip.go.id dan Data Exchange ke SINGAHKI Bareskrim;
- c. Administrasi melalui aplikasi: SIMPAKI (Sistem Pembayaran KI) – simpaki.dgip.go.id; E-SAKI (Administasi Perkantoran KI) – e-saki.dgip.go.id; dan TemanKita (Sistem Manajemen KI terpadu dan Aman);
- d. Penelusuran Kekayaan Intelektual dengan aplikasi seperti PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual), Pusat Data Nasional KI Komunal

– kikomunal-indonesia.dgip.go.id, dan Asean Patenscope; serta

- e. Aplikasi Mobile yaitu Portal Web DJKI (tersedia di Appstore).

Atas semua upaya optimalisasi layanan publik di bidang KI, masyarakat memberikan respon positif atas layanan yang diberikan oleh DJKI. Salah satu indikator dari respon positif masyarakat atas layanan DJKI adalah melalui pelaksanaan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Survei IKM). Hasil indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 menunjukkan peningkatan kepuasan atas layanan KI yaitu pada skala 3,3 (skala 1-4) capaian ini menunjukkan ada respon positif dibandingkan tahun 2018 dengan nilai indeks kepuasan masyarakat 3,26.

Dibidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, selama tahun 2019 DJKI memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 714.606.483.255,00 atau sekitar 142,92% dari jumlah yang ditargetkan yaitu Rp. 500.000.000.000,00. Sebagian pendapatan negara yang bersumber dari PNBP, dianggarkan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas dari unit kerja yang menghasilkan PNBP tersebut. Adapun DJKI sebagai unit kerja di lingkungan Kemenkumham dalam rangka mendayagunakan potensi dan penggunaan PNBP yang telah dihasilkan, memprioritaskan programnya pada beberapa langkah strategis, yang dirasa mampu meningkatkan pelayanan hukum di bidang KI bagi masyarakat, yaitu melalui penataan SDM, pembangunan infrastruktur, optimalisasi Teknologi Informasi, dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan serta Penyempurnaan Proses Bisnis.

Sementara itu selama tahun anggaran 2019 telah terlaksana penyerapan anggaran sejumlah 93,19% dari alokasi DIPA anggaran program penyelenggaraan Kekayaan Intelektual. Persentase penyerapan tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018 yang masih mencapai 89,77%. Secara

umum terdapat fluktuasi penyerapan anggaran selama periode 5 tahun terakhir. Kemampuan DJKI dalam menyerap anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal.

Pada tahun 2019 DJKI juga melaksanakan beberapa kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang KI dan memajukan sistem KI Nasional yaitu melalui optimalisasi Teknologi Informasi dengan meluncurkan layanan online bagi seluruh rezim layanan KI yang diampu oleh DJKI sebagai langkah DJKI dalam beradaptasi di era Revolusi Industri 4.0. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh DJKI secara massif untuk mengintensifkan penggunaan TI dalam peningkatan layanan publiknya adalah dengan melakukan launching permohonan layanan online bagi seluruh rezim KI seperti yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2019 bertepatan dengan momen perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-74. Adapun layanan KI online tersebut adalah permohonan Merek (baru dan perpanjangan), permohonan pencatatan Hak Cipta, permohonan Desain Industri, permohonan Indikasi Geografis, serta permohonan Paten. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen DJKI untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung kemandirian perekonomian Indonesia melalui penguatan sistem KI nasional.

Secara umum dikatakan DJKI telah melakukan tugas melaksanakan kebijakan KI dengan cukup baik dan sebagaimana besar memenuhi bahkan beberapa ada yang melampaui target yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat realisasi pencapaian pada beberapa indikator target yang belum terpenuhi secara maksimal. Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh DJKI pada tahun ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual;
- Penguatan Kelembagaan DJKI (ORTA);
- Penguatan Perundangan Kekayaan Intelektual (penyusunan PP, Permen sebagai peraturan pelaksana dari UU di bidang Kekayaan Intelektual);
- Penguatan Ketatalaksanaan Kekayaan Intelektual (SOP Bisnis Proses yang sesuai dengan perubahan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual);
- Penyelesaian tunggakan pekerjaan (backlog) permohonan Kekayaan Intelektual;
- Persentase Penggunaan Izin Penggunaan PNPB yang belum maksimal;
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia karena pengembangan pegawai yang ada belum dapat dilakukan secara maksimal;
- Penyerapan anggaran yang belum optimal. Adapun solusi dan langkah strategis yang dilakukan oleh DJKI atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
- Optimalisasi Layanan Kekayaan Intelektual dengan mengembangkan Teknologi Informasi dalam tahap berkelanjutan;
- Perbaiki kebijakan di bidang penganggaran berdasarkan value for money;
- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis internal DJKI;
- Monitoring dan evaluasi atas layanan yang diberikan kepada Stakeholder DJKI;
- Melakukan penataan dan penguatan ORTA, SOTK DJKI melalui penataan dan penguatan SOP;
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang KI agar efisien dan mendukung

kebijakan deregulasi peraturan perundang-undangan melalui penyusunan Omnibus Law di bidang Kekayaan Intelektual berikut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual (terutama Peraturan Pelaksanaan UU Paten dan UU Merek);

- Mengajukan Usulan Permintaan Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai analisa kebutuhan SDM;
- Optimalisasi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terutama di kegiatan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang menjadi pendukung utama bagi pelaksanaan optimalisasi layanan KI berbasis TI.

Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai DJKI atas kerja sama dan kontribusinya dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang KI. Saya harapkan para pegawai DJKI dapat terus memberikan kemampuan terbaiknya dalam bekerja dan melayani masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman KI dan memberikan layanan prima pada masyarakat. Optimalisasi layanan prima dengan berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh DJKI juga mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan diraihnya Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi Unit Kerja di lingkungan Kemenkumham yang telah berZona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Artinya layanan KI yang diberikan tidak hanya berbasis Teknologi Informasi yang user friendly bagi masyarakat tapi juga bebas KKN dan gratifikasi. Hal ini kiranya menjadi komitmen DJKI dalam mendukung terwujudnya Good Governance. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bpk. Yasonna H. Laoly atas berbagai kebijakan, arahan dan perhatian yang selama ini diberikan kepada DJKI.

Akhir kata, kiranya Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memajukan sistem KI Nasional.

**Billahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wa Barokatuh**

Jakarta, Juni 2020

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.



Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

**SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL**

**DIREKTORAT
PATEN, DESAIN
TATA LETAK
SIRKUIT
TERPADU DAN
RAHASIA
DAGANG**

**DIREKTORAT
TEKNOLOGI
INFORMASI
KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

**DIREKTORAT
HAK CIPTA
DAN DESAIN
INDUSTRI**

**DIREKTORAT
MEREK DAN
INDIKASI
GEOGRAFIS**

**DIREKTORAT
KERJA
SAMA DAN
PEMBERDAYAAN
KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

**DIREKTORAT
PENYELIDIKAN
DAN
PENYELESAIAN
SENGKETA**

Visi-Misi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Visi

MENJADI INSTITUSI KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN MENJADI PENDORONG INOVASI, KREATIFITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Misi

MEWUJUDKAN PELAYANAN DAN PENEGAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG BERKUALITAS



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



Lintasan Kegiatan DJKI

2019

29 Januari 2019

Menkumham Lantik Komisioner LMKN



Menkumham Yasonna H. Laoly melantik 10 (sepuluh) anggota komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2019-2024 di Lounge Gedung Setjen Kemenkumham

18 Februari 2019

Menkumham Serahkan Sertifikat Inventarisasi KIK Festival Cap Go Meh



Menkumham Yasonna H. Laoly menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Festival Cap Go Meh Singkawang kepada Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie di Ballroom Swiss Belinn Hotel Singkawang

12 Maret 2019

Pencanangan Tahun Desain Industri



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencanangkan Tahun 2019 sebagai Tahun Desain Industri. Hal ini sebagai fokus target DJKI dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Desain Industri

14 Maret 2019

Launching Sail Nias dan Menkumham Menyerahkan Surat Pencatatan KI Komunal kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara



Menkumham menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang berasal dari Pulau Nias kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah serta Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha dalam acara Soft Launching Sail Indonesia 2019 di Golden Ballroom The Sultan Hotel & Residence.

31 Maret 2019

Khanduri Laot Festival



Khanduri Laot Sabang 2019 resmi dibuka di Dermaga CT-3 BPKS di Kuta Timu, Kota Sabang, Aceh. Walikota Sabang, Nazzarrudin, Direktur Hak Cipta & Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Molan K. Tarigan, serta Staf Khusus Bidang Percepatan Calendar of Event Kementerian Pariwisata, Tasbir Abdullah turut hadir dan membuka acara tahunan ini

8 April 2019

Penyerahan Sertifikat HKI kepada Pelaku Ekonomi Kreatif





Pelindungan kekayaan intelektual (KI) bagi pelaku ekonomi kreatif begitu penting, karena pelaku ekonomi kreatif memiliki peran vital sebagai salah satu penggerak perekonomian bangsa. Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Sertifikat HKI Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif di Hotel JS Luwansa

8-9 April 2019

Kerja Sama DJKI-USPTO



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Bilateral dengan United States Patent and Trademark Office (USPTO) di Kantor USPTO, Virginia, Alexandria, Selasa (9/4/2019). Dalam MoU ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting dalam mengembangkan kebijakan kekayaan intelektual (KI), yaitu terkait reformasi legislasi, kolaborasi regional, administrasi kantor KI dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya KI

10 April 2019

Belajar Kilat Goes to School SD IT Insan Mandiri





Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mandiri Pejaten menjadi awal kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual (KI) yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Rabu (10/9/2019).

16 April 2019

Belajar Kilat Goes to School SD Meksiko



Kegiatan ini merupakan salah satu cara mengenalkan KI sejak dini dengan sasaran mulai dari siswa yang duduk di bangku sekolah dasar. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai peran dalam membina siswanya untuk mengembangkan minat bakat anak didiknya, dan tentunya hal tersebut berkait erat terhadap tercipta suatu inovasi.

26 April 2019

Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-19



Melalui Indonesia Intellectual Property Awards (IIPA), Menkumham, Yasonna H Laoly mengapresiasi tokoh, lembaga, dan Perguruan Tinggi yang berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan dan pemahaman kekayaan intelektual (KI) di Indonesia pada peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke 19 yang jatuh setiap tanggal 26 April.

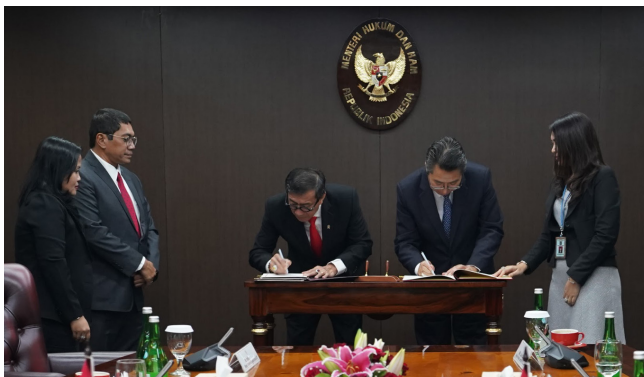
26 April 2019

Sosialisasi Penarikan Royalti Satu Pintu Bidang Musik dan Lagu



26 April 2019

Sosialisasi Penarikan Royalti Satu Pintu Bidang Musik dan Lagu



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Bilateral dengan United States Patent and Trademark Office (USPTO) di Kantor USPTO, Virginia, Alexandria, Selasa (9/4/2019). Dalam MoU ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting dalam mengembangkan kebijakan kekayaan intelektual (KI), yaitu terkait reformasi legislasi, kolaborasi regional, administrasi kantor KI dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya KI

28 Juni 2019

Kolaborasi dan Sinergi Pengembangan Kota Kreatif



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris menghadiri kegiatan Seminar Nasional Kolaborasi dan Sinergi Pengembangan Kota Kreatif untuk Akselerasi Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah yang digelar Indonesia Creative City Network (ICCN) di Hotel Four Point Surabaya, Jum'at (28/6/2019).

Freddy Harris menuturkan bahwa Kekayaan Intelektual (KI) tidak bisa dipisahkan dengan ekonomi dan komersialisasi, karena jika KI dapat terlindungi dengan baik maka akan membuat nilai ekonomi yang sangat menguntungkan bagi pemilik hak.

28 Juni 2019

Sosialisasi Penyusunan Spesifikasi Permohonan Desain Industri di Surabaya



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar acara Sosialisasi Penyusunan Spesifikasi Permohonan Desain Industri di JW Marriott Surabaya, Jum'at (28/6/2019). Dalam sambutannya Freddy Harris menyampaikan bahwa tahun 2019 ini DJKI telah mencanangkan sebagai tahun desain industri. Maka dianggap perlu melakukan sosialisasi terkait penyusunan permohonan desain industri, agar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpacu untuk melindungi hasil kreatifitasnya. Hal tersebut adalah upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dari suatu karya intelektual yang memiliki nilai-nilai ekonomi

3 Juli 2019

Sosialisasi pada Pameran APKASI



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memanfaatkan momentum Pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2019 untuk mensosialisasikan pemanfaatan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dalam pameran yang berlangsung selama tiga hari ini, DJKI membuka layanan pencatatan hak cipta online dan konsultasi KI

4 Juli 2019

MoU DJKI Dengan Universitas Indonesia



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatanganan nota kesepatakan bersama dengan Universitas Indonesia (UI) di bidang Kekayaan Intelektual (KI) yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan itu sendiri dilakukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris bersama Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Muhammad Anis di Gedung Rektorat Universitas Indonesia, Kamis (04/07/2019).

15 Juli 2019

Persetujuan Anggota Komisi IV DPR RI Tentang RUU Desain Industri



Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dinilai masih memiliki kelemahan dari aspek substansi, seperti prosedur pendaftaran, dan penegakan hukumnya. Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Perindustrian, seluruh fraksi sepakat untuk membahas revisi UU Desain Industri. Selanjutnya, fraksi-fraksi tersebut akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk pembahasan tingkat I RUU di DPR RI.



17 Juli 2019

**MoU Kemenkumham Bersama
Pemprov D.I. Yogyakarta**



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mensinergikan potensi dan tugas pokok untuk melaksanakan Sistem Kekayaan Intelektual (KI). Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (17/7/2019). Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemajuan KI termasuk kekayaan intelektual komunal (KIK) yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan KIK di Yogyakarta.



15 Agustus 2019

**Penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis
Kepada Bupati Temanggung**



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis Ikan Uceng Temanggung kepada Bupati Temanggung, Muhammad Al-Khadziq di Pendopo Jenar, Gedung Sekretaris Daerah Temanggung, Kamis (15/8/2019). Penetapan Indikasi Geografis (IG) yang dibuat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham adalah pada produk olahan Ikan Uceng. Sebab uceng hidup khas Temanggung sulit dibedakan dengan jenis ikan uceng dari daerah-daerah lain.

17 Agustus 2019
Soft Launching KI Online



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi pendaftaran kekayaan intelektual (KI) online untuk masyarakat Indonesia. Pendaftaran merek, desain industri dan paten dapat dilakukan secara online mulai tanggal 17 Agustus 2019. Kehadiran aplikasi ini akan mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan sendiri permohonan mereka di mana saja dan kapan saja.

11-14 September 2019
Sail Nias

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkenalkan layanan permohonan kekayaan intelektual secara online dalam pameran Wonderful Expo Sail Nias. Acara yang diikuti 46 instansi itu dibuka pada Rabu, 11 September 2019 di Teluk Dalam, Nias Selatan.



25 September 2019

Sosialisasi Penyusunan Spesifikasi Permohonan Desain Industri di Jakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM melakukan sosialisasi Penyusunan Spesifikasi Permohonan Desain Industri yang diselenggarakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan permohonan Desain Industri dalam rangka mensukseskan tahun ini sebagai tahun Desain Industri. Sebanyak 100 peserta dari Pelaku usaha termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Akademisi dan Perwakilan dari Asosiasi Desain Produk Indonesia mengikuti acara ini.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM memanfaatkan momentum pameran Trade Expo Indonesia 2019 (ITE 2019) untuk memberikan edukasi kepada para pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI). Pameran ITE 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan ini di gelar di Indonesia Convention Centre, BSD, Tangerang (17/10/2019). Dalam gelaran ITE ke-34 ini, DJKI membuka layanan konsultasi KI sekaligus mensosialisasikan pendaftaran KI secara online kepada masyarakat, pelaku usaha UMKM.

16-20 Oktober 2019

Sosialisasi pada Trade Expo Indonesia 2019

24-25 Oktober 2019

Sosialisasi pada Legal Expo 2019



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) turut memeriahkan gelaran Legal Expo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2019 yang diselenggarakan selama dua hari di Plaza Semanggi, Kamis (24/10/2019). Legal Expo kali ini ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya, karena diselenggarakan di ruang publik. Pada kesempatan ini, DJKI membuka layanan konsultasi kekayaan intelektual (KI), serta mengadakan games menarik seputar pengetahuan KI kepada para pengunjung booth. Ada makna dibalik penyelenggaraan Legal Expo di ruang publik, yaitu Kemenkumham ingin lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat sekaligus mengenalkan berbagai produk hukum dan layanan hukum serta informasi hukum dan HAM di negeri ini.

4-7 November 2019

**Rakernis DJKI dengan Kanwil
Kemenkumham bertemakan KI Komunal**



Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Seluruh Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham merupakan acara yang baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 acara Rakernis mengambil tema “**Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Pendorong Ekonomi Bangsa**” yang diselenggarakan di Hotel J.W. Marriot Jakarta pada 4 November 2019. Dalam acara ini juga sekaligus diluncurkan layanan E-Pengaduan aplikasi “Pengaduan KI Online” yang dapat diakses di E-pengaduan.dgip.go.id. Sistem pengaduan online ini akan mampu mengakomodir aduan berupa pelanggaran dan pelayanan kekayaan intelektual sehingga masyarakat akan lebih mudah dan aktif turut serta membantu DJKI dalam menciptakan iklim berkreasi dan berinovasi yang kondusif.

21 November 2019

Kerja Sama DJKI dengan Kantor Paten Eropa



Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil membuat kemitraan strategis dengan Kantor Paten Eropa (EPO) di Munich, Jerman, pada Kamis (21/11). Kerjasama ini sangat penting dalam proses perlindungan paten yang berisi inovasi dan teknologi di Indonesia. Sejalan dengan Antonio Campinos, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menyatakan kerjasama ini akan memperkuat kapasitas pemeriksa paten dalam memberikan layanannya kepada para penemu Indonesia

25 November 2019

DJKI Wakili Indonesia Diajang Pameran Internasional Inovasi Pelayanan Publik di Busan



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat kesempatan mewakili Indonesia mengikuti pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang the 2nd ASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan. Pameran ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo bersama pejabat tinggi setingkat menteri yang melihat secara langsung inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan negara-negara ASEAN lainnya.

9 Desember 2019

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Raih Predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM



Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang dinaungi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2019. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo di Ballroom Bidakara, pada Selasa 9 Desember 2019.



Katalog Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia

Indikasi Geografis Indonesia

Konsep indikasi geografis di Indonesia telah dibangun sejak tahun 2001 dengan dilahirkannya undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, dimana didalamnya mengatur terkait Indikasi Geografis (Pasal 56 Ayat (1)) yang kemudian diperbaharui melalui undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ketentuan barang atau produk tersebut sebagai indikasi geografis berdasarkan undang-undang tersebut sebagai syarat permohonan indikasi geografis di Indonesia sebagai berikut :

- Produk: pertanian, bahan makanan, kerajinan tangan atau produk lainnya yang memiliki karakter dan kualitas spesifik dikarenakan daerah asalnya.
- Produk yang berhubungan dengan daerah asal geografisnya: Hubungan tersebut dipahami sebagai faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari

keduanya.

- Nama Geografis.
- Produk dengan karakter dan kualitas spesifik: beberapa bentuk, rasa, warna, kualitas, dll yang membuatnya ‘unik/berbeda dari lainnya’

Karakteristik indikasi geografis di Indonesia erat dipengaruhi oleh kondisi geografis berupa negara maritim, kekayaan sumber daya alam dan budaya masyarakat yang beragam oleh suku dan adatnya. Kekayaan alam Indonesia yang berada di wilayah tropis memberikan julukan Jamrud Khatulistiwa yang didukung oleh budaya agraris di Indonesia, khususnya di sektor perkebunan, membuat Indonesia sebagai penghasil kopi terbesar ke-4 di Dunia. Rempah-rempah serta kerajinan tangan masyarakat Indonesia juga memberikan sumbangsih atas keberagaman indikasi geografis di Indonesia

“

Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

”

Rempah Indonesia : Lada Putih Munto



Karakteristik dan Keunggulan

Lada Putih Muntok ditandai dengan warna putih, aroma dan rasa yang kuat, karakteristik rasa aromatik pedas, minimal kadar papperine 15%.

Wilayah Geografis

Zona produksi Lada Putih Muntok terletak di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Proses Produksi

Lada Putih Muntok diperoleh dari buah olahan lada matang dan ditandai pada warna yang memiliki

warna kuning atau merah. Perlindungan Indikasi mengacu pada biji lada putih atau bubuk lada putih yang dihasilkan dari Lada Putih Muntok diproses oleh perendaman, pencucian dan pengeringan. Dalam metode pengolahan ada dua jenis metode: metode tradisional/ manual dan metode modern/ mekanik. Hubungan Antara Produk dengan Teritorial Bangka Belitung dengan tingkat curah hujan yang tinggi, yang terdiri dari 90% dataran rendah, dengan nutrisi tanah khas, serta intensitas radiasi matahari yang cukup untuk menghasilkan rasa yang berbeda dengan lada dari tempat lain.

Kopi Indonesia : Kopi Arabika Sumatera Simalungun



Karakteristik dan Keunggulan

Kopi Arabika Sumatera Simalungun memiliki rasa yang khas, dengan kualitas dan intensitas aroma yang beragam dengan cita rasa yang sangat baik, kadang-kadang dengan rasa buah, lemony, bunga, jagung manis, pedas, manis madu, manis, bright acidity, low acidity, rasa yang kompleks, ringan, dan good balance.

Wilayah Geografis

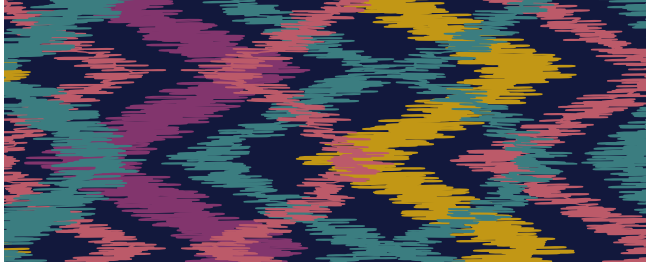
Zona produksi Kopi Arabika Sumatera Simalungun terletak di daerah dengan ketinggian 900-1400 m dpl, yang meliputi Kecamatan Raya, Purba, Haranggaol Horison, Silimakuta, Pematang Silimahuta, Dolok Silau, Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik, and Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun,

Provinsi Sumatera Utara.

Proses Produksi

Kopi Arabika Simalungun Sumatera dihasilkan dari buah kopi gelondong merah yang dihasilkan dari tanaman kopi Arabika yang dihasilkan dari wilayah Simalungun yang memiliki ketinggian 900 - 1.400 m di atas permukaan laut. Untuk mendapatkan biji kopi hijau, gelondong dicuci (metode pengolahan basah penuh), disortasi, dikupas, fermentasi, direndam, dikeringkan menggunakan sinar matahari, digrading, dan disimpan. Buah kopi gelondong merah harus dipetik dan diproses pada hari yang sama untuk menghasilkan Kopi Arabika Sumatera Simalungun dalam bentuk kopi hijau kering, kopi sangrai, dan kopi.

Kerajinan Tangan Indonesia : Tenun Ikat Sikka



Karakteristik dan Keunggulan

Tenun Ikat Sikka didominasi warna hitam indigo, ditata dengan beberapa ragam hias geometris. Bagian pinggirnya dihiasi jalur hitam yang kecil atau besar dengan variasi motif. Dalam susunan motif terdapat motif induk dengan hias relatif besar, diikuti dengan ragam hias yang sama seperti motif induk yang diperkecil.

Wilayah Geografis

Kabupaten Sikka sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termasuk dalam gugusan Pulau Flores dengan Ibukota terletak di Maumere.

Proses Produksi

Untuk memenuhi syarat sebagai Tenun Ikat Sikka Alam, kapas yang digunakan harus ditanam di lokal dan pembuatan benang dengan cara diputar tangan. Pewarna yang digunakan harus ekstrak alami dari bahan lokal. Bahan baku yang digunakan adalah benang kapas dan bahan baku lainnya seperti abu untuk merendam benang, minyak kenari dan minyak kemiri, yang dicampur dengan larutan dari pencampuran bahan mordant berupa daun pepaya yang kuning, abu dapur, karbon dari asap dapur tradisional, dan daun mama apur, leba roun heret, blata olan; untuk memudahkan proses pewarna merah mengkudu atau sebagai mordant. Alat utama yang digunakan dalam proses tenun adalah alat tenun dengan penyangga dibelakang pinggang. Dalam proses pembuatan tenun, semua alat harus terbuat dari bahan baku kayu atau produk alami lainnya

Kekayaan Alam Indonesia : Ubi Cilembu



Karakteristik dan Keunggulan

Ubi Cilembu Sumedang adalah memiliki rasa yang sangat manis, daging ubi berwarna kuning sampai kuning kemerahan dengan bentuk umbi memanjang. Rasa manis hanya diperoleh jika Ubi Cilembu Sumedang dibakar dalam oven. Ubi yang dibakar dalam oven akan mengeluarkan madu yaitu cairan karamel yang memiliki rasa manis dan berwarna kecoklatan di antara kulit dan daging umbi. Dengan teknik penyimpanan yang benar, Ubi Cilembu Sumedang dapat disimpan sampai 5 bulan tanpa mengalami kerusakan.

Wilayah Geografis

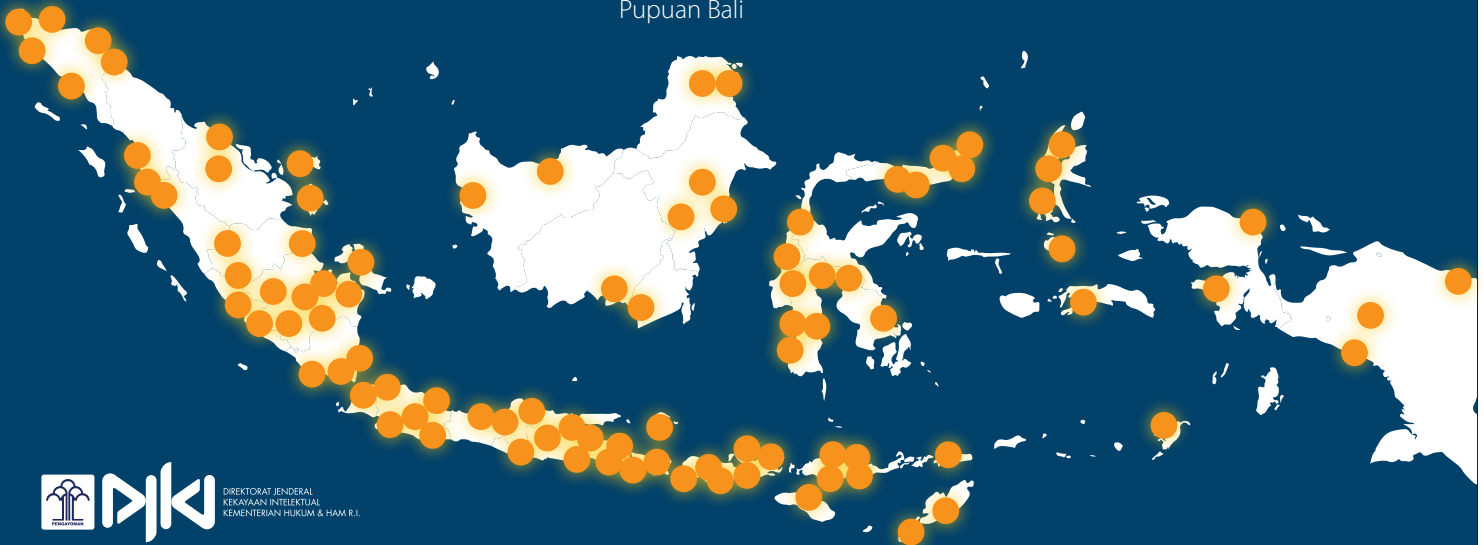
Zona produksi Ubi Cilembu Sumedang terletak di Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Tanjungsari dan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Proses Produksi

Diawali dengan proses pembibitan dari varietas nirkum, eno, dan rancing, pengolahan tanah tegalan maupun sawah bekas menanam padi, eknik penanaman, Pemeliharaan tanaman, Pengendalian Hama dan Penyakit dilakukan oleh petani. Panen dilakukan saat berusia 4-7 bulan, bersihkan lalu seleksi dan sortasi ubi berdasarkan ukuran dan warna kulit ubi yang seragam, kemudian di masukkan ke dalam keranjang. Saat pascapanen dilakukan sortasi kembali, dicuci dengan air bersih, dikeringkan, dan dilakukan pengemasan. Ubi Cilembu Sumedang yang telah layu (peot) siap dibakar dalam oven dengan suhu pembakaran 150 - 220o C selama kurang lebih 90-120 menit.

Peta Wilayah Indikasi Geografis Terdaftar

- Kopi Arabika Kintamani Bali
- **Champagne** (Perancis)
- Mebel Ukir Jepara
- Lada Putih Muntok
- Kopi Arabika Gayo
- **PISCO** (Peru)
- Tembakau Hitam Sumedang
- Tembakau Mole Sumedang
- **Parmigiano Reggiano** (Italia)
- Susu Kuda Sumbawa
- Kangkung Lombok
- Madu Sumbawa
- Beras Adan Krayan
- Kopi Arabika Bajawa Flores
- Purwaceng Dieng
- Carica Dieng
- Vanili Kepulauan Alor
- Kopi Arabika Kalosi Enrekang
- Ubi Cilembu Sumedang
- Salak Pondoh Sleman Jogja
- Minyak Nilam Aceh
- Kopi Arabika Java Preanger
- Kopi Arabika Ijen Raung
- Bandeng Asap Sidoarjo
- Kopi Arabika Toraja
- Kopi Robusta Lampung
- Tembakau Srinthil Temanggung
- Mete Kubu Bali
- Gula Kelapa Kulonprogo Jogja
- Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing
- Kopi Arabika Sumatera Simalungun
- Kopi Liberika Tuingkal Jambi
- Cengkeh Minahasa
- Beras Pandanwangi Cianjur
- Kopi Robusta Semendo
- Pala Siau
- Teh Java Preanger
- Garam Amed Bali
- **Lamphun Brocade Thai Silk** (Thailand)
- Jeruk Keprok Gayo-Aceh
- Kopi Liberika Rangsang Meranti
- Lada Hitam Lampung
- Kayumanis Koerintji
- **Tequila** (Meksiko)
- **Grana Padano** (Italia)
- Tunun Gringgsing Bali
- Tenun Sutera Mandar
- Kopi Arabika Sumatera Mandailing
- Pala Tomandin Fakfak
- Jeruk SoE Mollo
- Cengkeh Moloku Kie Raha
- Mete Muna
- Kopi Robusta Temanggung
- Sawo Sukatali Sumedang
- Kopi Robusta Empat Lawang
- Tenun Ikat Sikka
- Duku Komerling
- Kopi Arabika Sumatera Koerintji
- Kopi Robusta Pinogu
- Kopi Robusta Pupuan Bali
- Tenun Ikat Tanimbar
- Kopi Robusta Tambora
- Kopi Arabika Sumatera Lintong
- Beras Raja Uncak Kapuas Hulu
- Kopi Arabika Flores Manggarai
- Kopi Arabika Sipirok
- Kopi Arabika Pulo Samosir
- **Scotch Whisky**
- **Modena/Di Modena**
- Barih Solok
- Pala Dukono Halmahera Utara
- Kopi Robusta Kepahiang
- Ikan Uceng Temanggung
- Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali
- Sidat Marmorata Poso
- Tenun Ikat Alor
- Tenun Songket Alor
- Kopi Robusta Sidikalang
- Gula Lontar Rote
- Kopi Robusta Java Bogor
- Tenun Doyo BTIJKB
- Songket Silungkang
- Kopi Arabika Baliem Wamena
- Kopi Robusta Pasuruan
- Sagu Lingga
- Kopi Arabika Tanah Karo
- Kopi Robusta Rajang Lebong Bengkulu
- Lada Malonan Kutai Kartanegara Kaltim
- **Cognac**
- Pala Kepulauan Banda
- Lada Luwu Timur
- Batik Tulis Nitik Yogyakarta
- Garam Gunung Krayan
- Kopi Robusta Pagaralam
- Salak Sibetan Karangasem Bali





Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Capaian Kinerja DJKI Tahun Anggaran 2019

Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2019 didasarkan pada

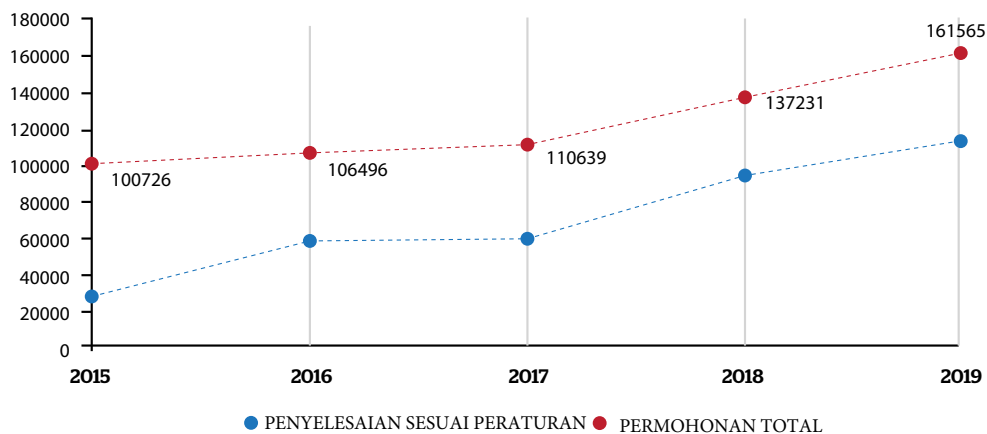
perencanaan program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu Rencana Strategis yang didokumentasikan dalam perjanjian kinerja Eselon I kemudian diturunkan melalui perjanjian kinerja Eselon II.

No	Indikator Keluaran Program	Target	Formulasi Pengukuran	Realisasi	Persentase																								
A	B	C	DE		F																								
1	Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	99%	Jumlah penyelesaian permohonan kekayaan intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dibagi target penyelesaian permohonan kekayaan intelektual pada tahun 2019 dikali 100%	Total penyelesaian sesuai peraturan : 114.391 dokumen dengan jumlah total permohonan masuk 161.565 permohonan	70,81%																								
2	Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	80%	Jumlah permohonan KI oleh masyarakat melalui sistem online dibagi total permohonan KI yang masuk dikali 100%	Permohonan Masuk online : 127.854 Total permohonan masuk : 161.549 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Permohonan</th> <th>Total Permohonan KI</th> <th>Permohonan Online</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cipta</td> <td>42768</td> <td>42.768</td> </tr> <tr> <td>Desain Industri</td> <td>4.361</td> <td>2.521</td> </tr> <tr> <td>Merek</td> <td>81.194</td> <td>59.227</td> </tr> <tr> <td>Perpanjangan Merek</td> <td>20.620</td> <td>14.762</td> </tr> <tr> <td>Paten</td> <td>10.025</td> <td>6.591</td> </tr> <tr> <td>Paten Sederhana</td> <td>2.581</td> <td>1.985</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>161.565</td> <td>127.870</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Permohonan	Total Permohonan KI	Permohonan Online	Cipta	42768	42.768	Desain Industri	4.361	2.521	Merek	81.194	59.227	Perpanjangan Merek	20.620	14.762	Paten	10.025	6.591	Paten Sederhana	2.581	1.985	Total	161.565	127.870	79,14%
Jenis Permohonan	Total Permohonan KI	Permohonan Online																											
Cipta	42768	42.768																											
Desain Industri	4.361	2.521																											
Merek	81.194	59.227																											
Perpanjangan Merek	20.620	14.762																											
Paten	10.025	6.591																											
Paten Sederhana	2.581	1.985																											
Total	161.565	127.870																											
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,3	Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	3,26	98,78%																								
4	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	80%	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran KI pada tahun 2019 di bagi jumlah pengaduan pelanggaran KI tahun 2019	Jumlah pengaduan yang masuk : 41 pengaduan, proses penanganan : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wasmat</th> <th>6</th> <th>Penanganan Wasmat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gelar Perkara</td> <td>15</td> <td>Penanganan Gelar Perkara</td> </tr> <tr> <td>SP3 (Bukan Tindak Pidana)</td> <td>9</td> <td>8 Kasus Merupakan LK 2018</td> </tr> <tr> <td>SP3 (Ditarik kembali)</td> <td>18</td> <td>6 Kasus Merupakan LK 2018</td> </tr> <tr> <td>SP3 (Mediasi)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wasmat	6	Penanganan Wasmat	Gelar Perkara	15	Penanganan Gelar Perkara	SP3 (Bukan Tindak Pidana)	9	8 Kasus Merupakan LK 2018	SP3 (Ditarik kembali)	18	6 Kasus Merupakan LK 2018	SP3 (Mediasi)			119,51%									
Wasmat	6	Penanganan Wasmat																											
Gelar Perkara	15	Penanganan Gelar Perkara																											
SP3 (Bukan Tindak Pidana)	9	8 Kasus Merupakan LK 2018																											
SP3 (Ditarik kembali)	18	6 Kasus Merupakan LK 2018																											
SP3 (Mediasi)																													

Penjelasan

1. Indikator Program: “Menyelesaikan permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Penyelesaian permohonan kekayaan intelektual pada tahun 2019 belum memenuhi target, yaitu sebesar 70,81% penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah total



Jenis Layanan	Permohonan	Penyelesaian Sesuai Peraturan	Total Penyelesaian
Cipta	42768	42768	42768
Di	4361	4331	5313
Merek	81194	569	86735
IG	16	13	26
Paten	10025	4354	17067
Paten Sederhana	2581	441	1591
Perpanjangan Merek	20620	50915	50915
Total	161565	113587	203319

permohonan layanan kekayaan intelektual sebesar 161.553 permohonan. Layanan penyelesaian yang diberikan sesuai dengan jenis permohonan yang masuk yaitu dijabarkan sebagai berikut:

Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya fokus dan komitmen dari DJKI untuk menyelesaikan tunggakan penyelesaian permohonan kekayaan intelektual paten dan merek yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga 2019. Langkah penyelesaian tunggakan permohonan ini akan selesai di pertengahan

tahun 2020, dan proses penyelesaian permohonan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Grafik di atas menunjukkan capaian kinerja pertahun penyelesaian permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2018 terdapat perbedaan perhitungan dimana layanan permohonan perpanjangan merek dan SPML tidak diperhitungkan. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2017, 2016, dan 2015 secara berturut-turut sebagai berikut : 333%, 143%, dan

119%, yang disebabkan penyelesaian backlog dihitung sebagai capaian kinerja.

Dalam upaya meminimalisir adanya backlog pada setiap tahapan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual membangun sistem teknologi informasi dalam tahapan

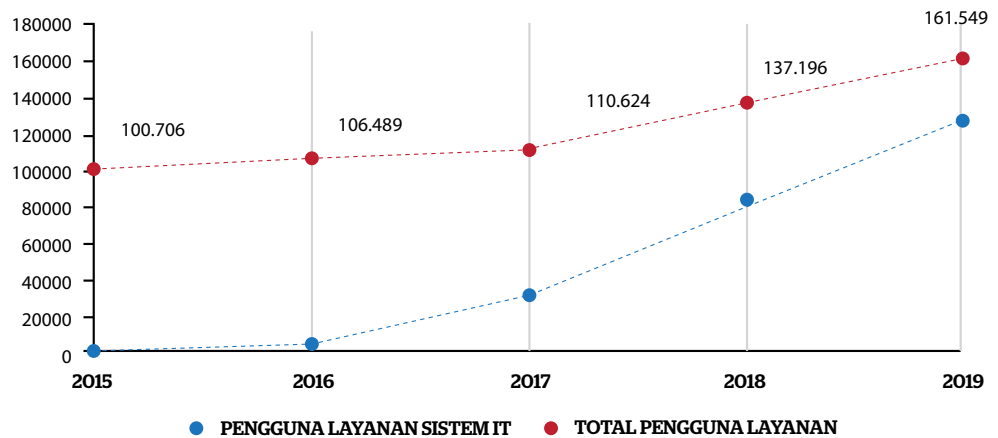
penyelesaiannya, salah satunya dengan peluncuran sistem permohonan online pada 17 Agustus 2019 yang selanjutnya akan diteruskan dengan pembangunan sistem pada tahap pemeriksaan substantive hingga pada penyelesaian sertifikat. Upaya peningkatan kinerja juga telah dilakukan pada tahun 2018 dengan penerapan e-hak cipta yang mampu mendorong pencatatan hak cipta dalam waktu 2 hari, dan memberikan kontribusi peningkatan permohonan cipta pada tahun 2018 sebesar 30.672 dan ditahun 2019 42.768 permohonan.

2. Indikator Program: “Optimalisasi penggunaan teknologi informasi”

Layanan kekayaan intelektual yang telah diintegrasikan dengan sistem teknologi informasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu:

- Pengajuan permohonan kekayaan intelektual secara online,
- Permohonan perpanjangan merek online,
- Database kekayaan intelektual yang akurat,
- Pengembangan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual secara online
- Sistem e-status terhadap permohonan kekayaan intelektual berbasis mobile apps (tahap pengembangan).

Realisasi pemanfaatan sistem informasi layanan kekayaan intelektual adalah 127.854 dari total pengguna layanan kekayaan intelektual 161.549 pengguna (79,14%). Pelayanan kekayaan



intelektual menggunakan sistem aplikasi online, untuk selanjutnya diharapkan bisa dilaksanakan secara penuh dan menyeluruh (full online) di semua bidang kekayaan intelektual. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2019 telah ditetapkan kebijakan untuk mengembangkan sebuah sistem baru menggantikan sistem yang telah ada. Perlu dilakukannya evaluasi terhadap eksisting system TI dalam persiapan pembangunan *The Next System* yang lebih transparan dan akuntabel, terintegrasi, *user friendly*, dan *paperless*.

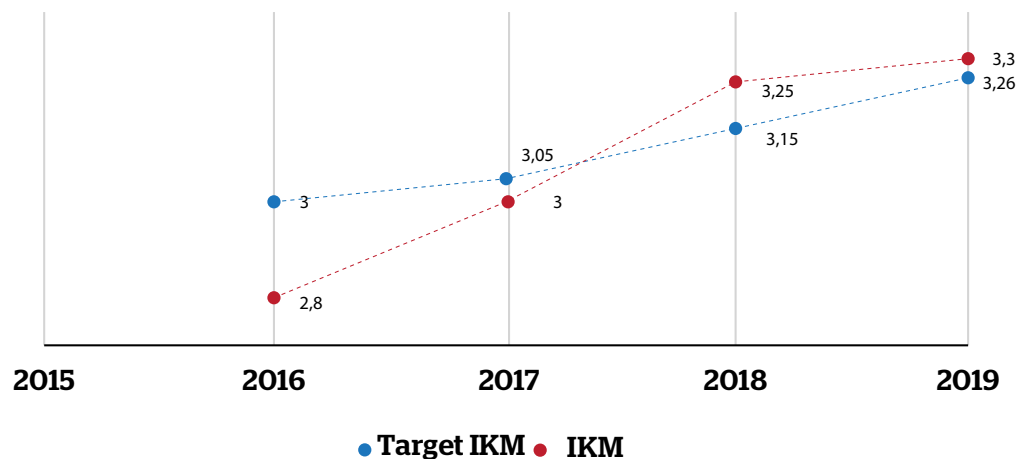
3. Indikator Program: “Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual”

Pelaksanaan survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei yang dilaksanakan dengan 9 komponen plus 1 unsur penilaian. Survei indeks kepuasan atas layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2019 dilaksanakan kepada 285 responden pemohon layanan kekayaan intelektual pada 6 Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan mulai bulan

Oktober hingga November 2019 yang diharapkan dapat memberikan respon masyarakat atas pelayanan kekayaan intelektual termasuk pelayanan permohonan online untuk semua kekayaan intelektual yang diluncurkan mulai tanggal 17 Agustus 2019. Hasil indeks kepuasan masyarakat menunjukkan ada respon positif dibandingkan tahun 2018 dengan nilai indeks kepuasan masyarakat 3,26 (skala 1-4), dengan nilai hampir mencapai target program kepuasan masyarakat 2019 3,3.

Belum maksimalnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kekayaan intelektual dapat di perbaiki pada pengembangan pada 4 aspek pelayanan yaitu:

- Aspek waktu penyelesaian:
Perbaikan pelayanan dalam menjamin kesesuaian dengan jangka waktu pelayanan, dengan memberikan informasi yang jelas terkait tahapan-tahapan setiap jenis pelayanan dan status pelayanan permohonan yang sedang ditangani. Hal ini mempertimbangkan panjang dan lamanya proses penyelesaian beberapa jenis layanan kekayaan intelektual, sehingga perlu adanya kejelasan informasi atas tahapan-tahapan



Aspek Pelayanan	Nilai IKM 2019
1. Persyaratan,	3,378
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur,	3,244
3. Waktu penyelesaian,	3,0036
4. Biaya / tarif,	3,1624
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan,	3,1592
6. Kompetensi palaksana,	3,3832
7. Perilaku pelaksana,	3,512
8. Sarana prasarana,	3,2756
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	3,092
10. Unsur pemanfaatan teknologi informasi	3,3984

pelayanan kepada pemohon atau masyarakat.

- Aspek Penanganan pengaduan, saran, dan masukan:

Pengembangan kompetensi SDM di bidang penanganan aduan layanan, saran, dan masukan dalam memberikan solusi atas aduan yang masuk, serta peningkatan kompetensi SDM di

kantor wilayah terkait pelayanan kekayaan intelektual, sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi.

- Aspek Produk spesifikasi jenis layanan:
Diperlukan peningkatan monitoring dan evaluasi hasil keluaran/output atas setiap jenis pelayanan kekayaan intelektual terkait kesesuaian dengan standar produk layanan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini untuk menjamin kualitas hasil pelayanan.
- Aspek Biaya/tarif layanan.

4. Indikator Program: “Menyelesaikan pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Aspek perlindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat diwujudkan dalam penggunaan produk kekayaan intelektual dalam komersialisasi maupun dalam aspek keuntungan moral atas karya, ciptaan maupun invensi yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pengampu peran penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual memberikan perlindungan kepada masyarakat atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya melalui upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual maupun upaya penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Pada tahun 2019 ini,

Penanganan	Jumlah	Keterangan
Administrasi	16	
Wasmat	6	Penanganan wasmat
Gelar Perkara	15	Penanganan Gelar Perkara
SP3 (Bukan Tindak Pidana)	9	8 kasus merupakan LK 2018
SP3 (Ditarik Kembali)	18	16 kasus merupakan LK 2018
SP3 (Mediasi)	1	
Total Penanganan	41	

Penegakan Hukum KI	Jumlah	Keterangan
Penutupan Konten Website	199	Jumlah rekomendasi situs website yang ditutup

Penegakan Hukum KI	Jumlah	Keterangan
Putusan Komisi banding Paten	13	penolakan permohonan: 12 koreksi atas deskripsi, klaim, dan gambar setelah permohonan diberi: 0 keputusan pemberian paten: 1
Putusan Komisi banding merek	792	dikabulkan: 269 dikabulkan sebagian: 24 tolak: 499

DJKI sebagai bentuk komitmen dalam penegakan hukum kekayaan intelektual, memberikan inovasi pelayanan dengan pengembangan sistem pengaduan pelanggaran KI secara online “E-PENGADUAN”. Target indikator program pada tahun ini adalah penanganan 80% dari pengaduan yang masuk di tahun 2019 dengan capaian 119,51% dari 41 aduan (Laporan Kejadian (LK)) masuk telah ditangani dengan catatan 3 aduan masuk tidak dilengkapi informasi pelapor dan terlapor. Tahapan penanganan aduan pada tahun 2019 sebagai berikut:

Dari 41 aduan yang telah di administrasi sebanyak 14 aduan baru masuk di bulan November 2019, sehingga aduan masuk yang masih di

tahap administrasi masih 16 aduan (LK). Selain itu ditahun 2019 telah diselesaikan sebanyak 24 putusan SP3 atas aduan yang masuk ditahun 2018 (laporan Kejadian/LK 2018), sehingga total aduan yang mendapatkan SP3 di tahun 2019 adalah 28 kasus. Pada tahun 2018 sebanyak 27 aduan pelanggaran masuk dengan total aduan yang ditangani adalah 15 aduan, dengan 8 aduan telah mendapatkan SP3 dan 7 aduan masih dalam proses penanganan. Banyaknya aduan yang belum ditangani di tahun 2018 disebabkan jumlah aduan yang masuk di akhir November hingga Desember 2018.

Selain itu dilakukan upaya penindakan pelanggaran kekayaan intelektual dengan memberikan rekomendasi penutupan konten website pelanggar kekayaan intelektual di tahun 2019 sebanyak 199 rekomendasi penutupan website, dan ditahun 2018 sebanyak 390 rekomendasi. Upaya ini dilaksanakan atas kerjasama DJKI dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan sejak tahun 2018.

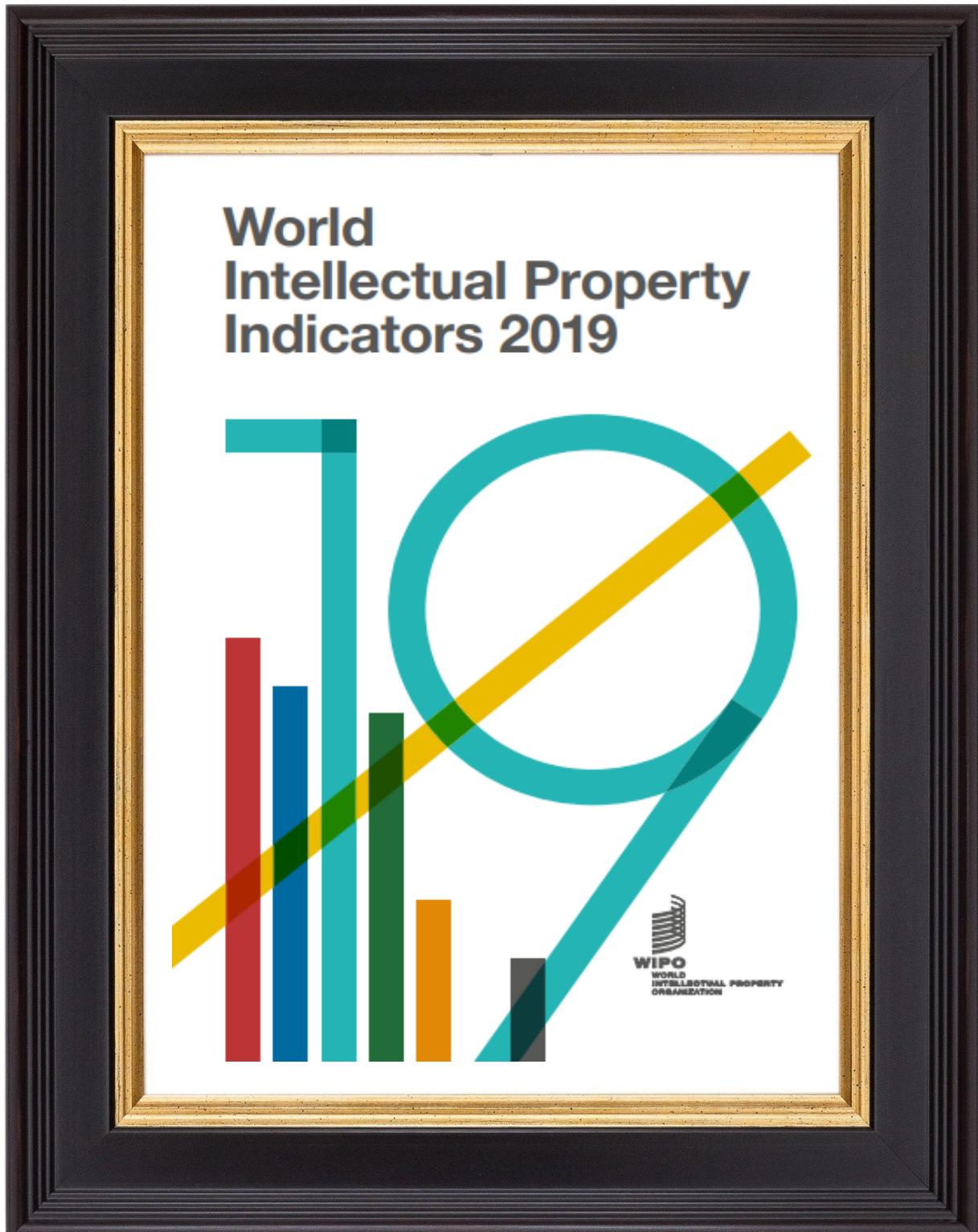
Upaya penegakan hukum kekayaan intelektual juga dilaksanakan dengan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang aktif dilakukan oleh DJKI sebanyak 23 daerah di Indonesia yang terfokus pada daerah Jawa, Sumatera, Bali, NTT, NTB. Selain pada penanganan dan penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual, upaya penegakan hukum kekayaan intelektual juga dilaksanakan melalui sidang komisi banding merek dan paten, yaitu penyelesaian permohonan kekayaan intelektual yang memiliki potensi pelanggaran kekayaan intelektual yang telah dilindungi.

Prestasi DJKI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dan strategis dalam upaya perlindungan suatu kekayaan intelektual melalui tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum dan melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual. Adapun peranan DJKI terkait hal ini adalah dengan senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengadministrasian pendaftaran Kekayaan Intelektual tersebut dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas akan pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dan penggunaan produk asli serta melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Melalui pengadministrasian pendaftaran Kekayaan Intelektual, diharapkan hal ini akan mendorong percepatan dan kemudahan dalam memulai suatu usaha di Indonesia, selain itu diharapkan lebih lanjut hal ini akan menciptakan suatu iklim usaha dengan persaingan yang sehat diantara para pelakunya khususnya terkait aspek kekayaan intelektual. Dewasa ini masih cukup sering ditemui adanya upaya-upaya persaingan usaha tidak sehat tersebut, di mana pelaku usaha menggunakan suatu Kekayaan Intelektual yang bukan haknya sehingga berujung kepada gugatan hukum oleh pemilik kekayaan intelektual tersebut. Atas hal ini database yang ada pada DJKI menjadi salah satu pertimbangan utama pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut.

Selain itu DJKI juga memiliki peran penting dalam mengembangkan inovasi di bidang teknologi di skala nasional, di mana data-data paten kadaluarsa dapat diakses oleh para peneliti dan badan penelitian nasional dalam rangka menemukan kebaruan atas invensi-invensi yang telah daluarsa tersebut. Hal ini tentunya juga akan memudahkan bagi para peneliti tersebut untuk mengetahui apakah penelitian yang akan dan/atau sedang dilakukannya merupakan investasi yang memiliki kebaruan, sehingga dapat didaftarkan pada DJKI serta memberikan keuntungan bagi masyarakat luas maupun industri.



Looking beyond the top 10 offices to the top 20 list, France granted 12,249 patents in 2018. Brazil (9,966), China, Hong Kong SAR (9,651) and Mexico (8,921) each issued more than 8,900 patents (figure A15). **The offices of Indonesia (+176.1%)** and Brazil (+82.9%) recorded the fastest growth among the top 20 offices in 2018. In contrast, Malaysia (-15.3%), Singapore (-16.8%) and South Africa (-14.3%) all had double-digit declines.

Sejak tahun 2015, DJKI telah merintis melakukan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi KI guna mendukung pelaksanaan e-Gov. di lingkungan Kemenkumham sebagai komitmen Menteri Hukum dan HAM dalam mendukung kebijakan pemerintah menjadikan organisasi pemerintahan sebagai birokrasi cerdas dan dekat kepada masyarakat dalam memberikan layanan publiknya. Atas semua langkah-langkah DJKI dalam mencapai tidak hanya kinerja yang telah ditargetkan namun lebih daripada itu untuk memberikan optimalisasi layanan publik di bidang Kekayaan Intelektual bagi masyarakat, maka DJKI telah mendapatkan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas inovasi dalam berkinerja. Pada tahun 2017 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan penghargaan DJKI sebagai insituti pemerintah yang memiliki inovasi pelayanan publik yaitu masuk di dalam “Top 20 Inovasi Layanan Publik” atas layanan permohonan perpanjangan Merek (e-renewal).

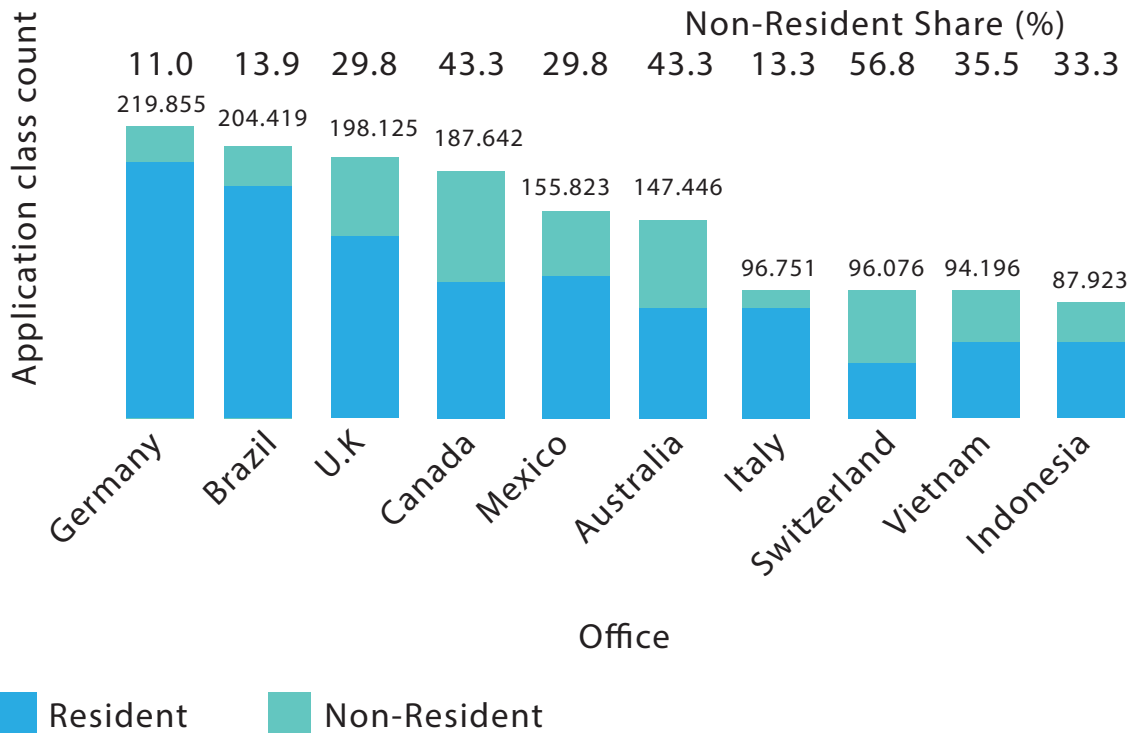
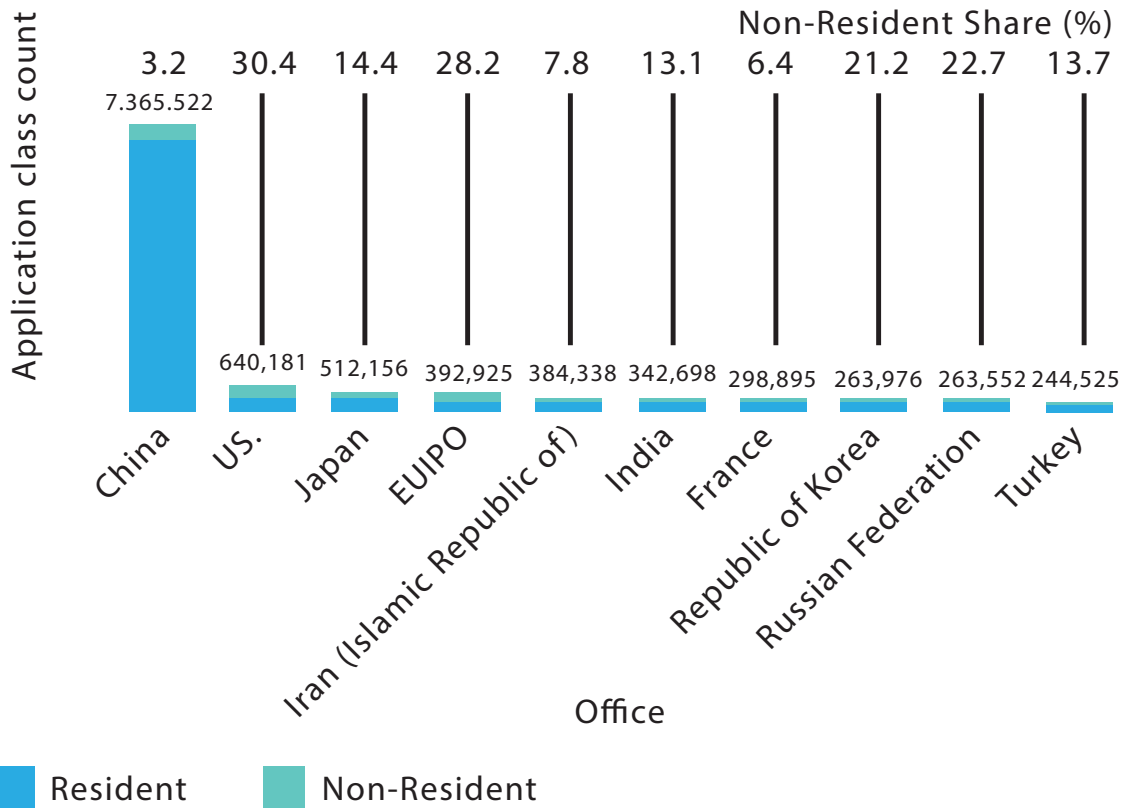
Selanjutnya pada tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM kembali mendapatkan pengakuan sebagai salah satu instansi pemerintah yang giat mendukung e-Gov. dalam memberikan layanan public bagi masyarakat melalui inovasi E-Hak Cipta atas pencatatan online Hak Cipta dengan menggunakan Teknologi Kriptografi. Selain itu masih di tahun 2018 juga Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Bapak Freddy Harris mendapatkan Penghargaan dari LEPRID (Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia) atas komitmen dalam mendukung e-Gov. sebagai motor dalam pengoptimalisasian TI dalam memberikan layanan public yang prima. Penghargaan ini diberikan atas inovasi e-Indikasi Geografis sebagai layanan pengajuan permohonan Indikasi Geografis pertama di Indonesia juga di dunia. DJKI JUGA pada tahun 2018 telah masuk sebagai salah satu unit Eselon I Kemenkumham yang dicalonkan menjadi Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) melalui pencalonan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sebagai Unit Kerja DJKI dengan predikat WBK/WBBM. Adapun dari segi akuntabilitas hasil kinerja yang telah tercapai,

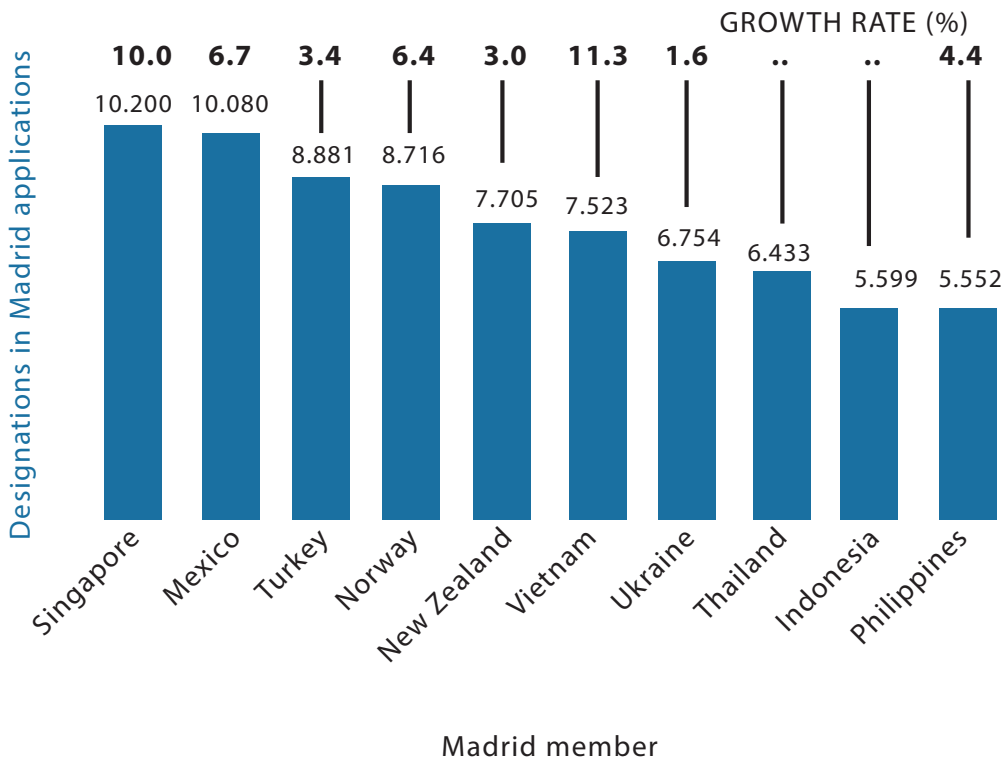
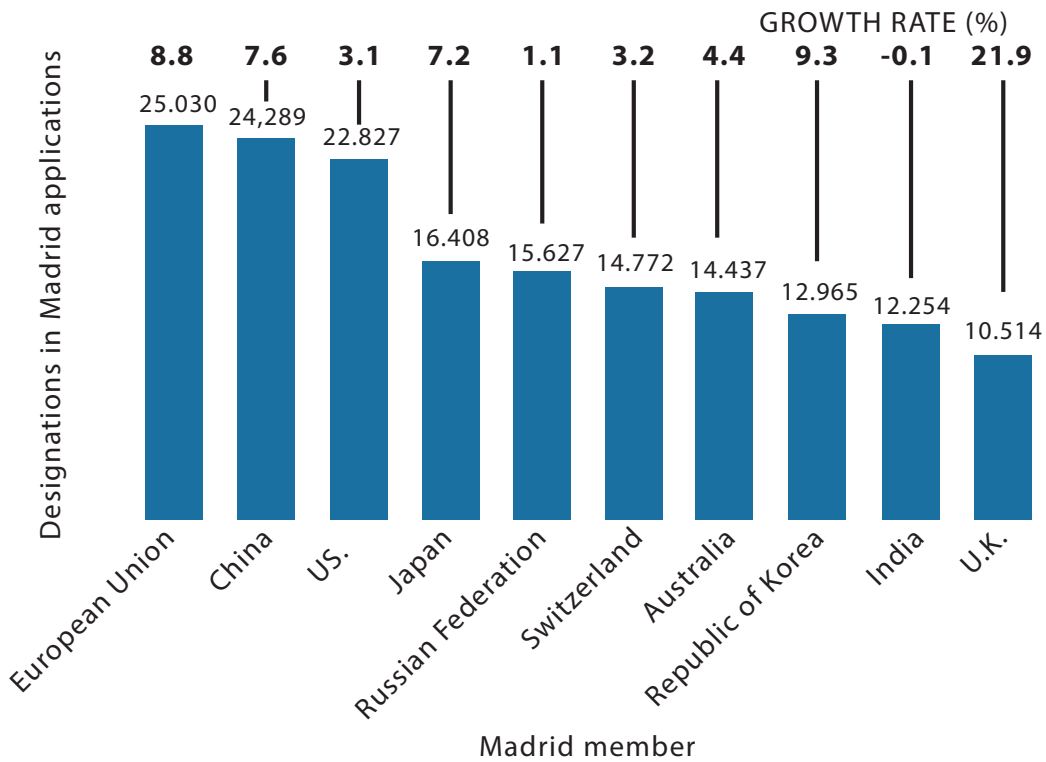
DJKI mendapat penilaian Reformasi Birokrasi dengan angka 86,55 (sangat baik) raihan ini mencatatkan DJKI dalam peringkat 3 terbaik di lingkungan Unit Eselon I Kemenkumham. Di tahun 2019 DJKI kembali mencatatkan sebagai Unit Eselon I terbaik ke-2 setelah Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indeks penilaian Reformasi Birokrasi merupakan tolok ukur penilaian akuntabilitas pada suatu lembaga pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 2019 DJKI melalui Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri menjadi Unit Kerja ber-Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Pemerintah RI melalui KemenPAN-RB) memberikan penghargaan DJKI sebagai insituti pemerintah yang memiliki inovasi. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam memberikan layanan KI kepada publik juga dianggap oleh Pemerintah sebagai langkah strategis untuk memberantas pungli. Pada November 2019 sebagai suatu kebanggan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh DJKI yaitu Hak Cipta Online telah mewakili Indonesia di Kompetisi Public Service Innovation Exhibiton di Busan, Korea Selatan dan aplikasi Hak Cipta online ini bertarung dengan para kompetitor dari seluruh dunia (lembaga pemerintah) dimana Indonesia termasuk di dalam peringkat Top 10 dalam acara ini sehingga akan dijadikan sebagai proyek percontohan bagi negara-negara lainnya terkait sistem onlinenya.

Sedangkan untuk prestasi secara internasional, pada tahun 2019 Indonesia dinobatkan sebagai Negara dengan Peningkatan Pemberian Granted Paten tertinggi oleh WIPO dengan persentase pemberian/ granted paten mencapai 176,1%.

Masih menurut rilis WIPO Indicators 2019, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM termasuk Top 20 Intellectual Property Office in The World (Peringkat 20 Besar Kantor KI di Dunia) dalam kategori Trade Mark (Merek) baik terkait dengan kontribusi kelas permohonan (Application Class) yang berasal dari share resident dan non-resident dan permohonan melalui Madrid Protocol.



B50. Designations in Madrid international applications for the top 20 designated Madrid members, 2018


Isu Strategis

Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Program Prioritas Nasional

Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat ditopang oleh investasi inovasi kekayaan intelektual yang selalu tumbuh dan berkembang seiring komersialisasi atas KI tersebut. Menurut hasil penelitian INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) setiap peningkatan 1% kenaikan jumlah paten ternyata mampu berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,06%. Artinya bila jumlah paten bisa naik 10% saja maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi 0,6 %. Selain itu, dari hasil penelitian lain yang dilakukan oleh INDEF pada tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap kenaikan 10% paten di seluruh sektor industri berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 1,69%, sementara 10% kenaikan investasi hanya berdampak sebesar 1,64%. Berdasarkan beberapa data tersebut dapat menggambarkan bahwa potensi KI dalam pertumbuhan ekonomi sangat besar. Ini merupakan potensi besar di Indonesia apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal. Revolusi Industri 4.0 sangat memiliki keterkaitan dengan inovasi,

Kekayaan Intelektual, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kekayaan Intelektual adalah sebagai aset nasional sekaligus penggerak inovasi dalam era Revolusi Industri 4.0.

Secara garis besar terdapat peran strategis DJKI dalam ekonomi nasional, khususnya dalam mengakselerasi daya saing ekonomi bangsa, yang meliputi 4 hal utama yaitu: peran sebagai regulator, sebagai administrator, peran dalam penegakkan



KI Komunal Prioritas Nasional Tahun 2020

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020

Isu Strategis Kekayaan Intelektual dalam Akselerasi
Daya Saing Ekonomi Bangsa

RPJMN 2020 - 2024



Tahun 2020 DJKI akan mendorong **Penguatan & Penyempurnaan Regulasi serta Kebijakan KI Internasional dalam Masalah KIK**

DJKI fokus **bekerjasama dengan WIPO melalui skema Funds In Trust (FIT)** untuk penataan regulasi ini

DJKI sebagai *Leading Sector* atau *Law Center* atas proteksi dan administrasi KI nasional akan fokus untuk melakukan **Penyusunan instrumen hukum nasional untuk perlindungan KIK secara positif**

Penyusunan Instrumen Hukum Nasional KIK merupakan prioritas utama sebagai pendorong penyusunan instrumen hukum KIK di tingkat internasional

Pembangunan Pusat Data Nasional KIK sebagai sarana perlindungan secara defensif mutlak diperlukan - Integrasi data antar K/L & Stakeholder terkait

hukum di bidang KI, serta diseminasi KI yang menuju pada komersialisasi atas KI. Mengingat pentingnya peranan KI sebagai aset bagi daya saing ekonomi bangsa, maka pada tahun 2020 salah satu rezim dari KI yaitu Kekayaan Intelektual Komunal ditetapkan menjadi salah satu target dari Program Prioritas Nasional Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagaimana di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024 yang menggariskan bahwa salah satu agenda pembangunan adalah dengan membangun kebudayaan dan karakter bangsa, maka dirasa perlu untuk mengangkat perlindungan atas KI Komunal dan Hak Cipta sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional. Selain itu di dalam RPJMN periode 2020-2024 juga ditetapkan bahwa modal social dan budaya sebagai pengarusutamaan dari kebijakan jangka menengah dalam membangun ekonomi nasional selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan targetnya berupa perlindungan atas KI Komunal yang berbasis ekosistem. Atas semua kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional tersebut, DJKI tentunya memiliki komitmen untuk melakukan penguatan dan penyempurnaan regulasi serta kebijakan KI Internasional terkait KI Komunal (mengingat hingga saat ini belum terdapat regulasi yang berlaku secara umum dan lintas batas internasional mengenai perlindungan atas KI Komunal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan DJKI dalam melaksanakan komitmen tersebut adalah sebagai berikut:

1. DJKI sebagai leading sector atau law center atas proteksi dan administrasi KI Nasional akan focus untuk melakukan penyusunan instrumen hukum nasional untuk perlindungan KI Komunal secara positif;
2. Penyusunan Instrumen Hukum Nasional KI Komunal sebagai prioritas utama sebagai pendorong penyusunan instrument hukum KI Komunal tingkat internasional; serta
3. Pembangunan Pusat Data Nasional KI Komunal sebagai sarana perlindungan secara defensive yang mutlak diperlukan (terutama integrasi data antar K/L dan atau stakeholder terkait).

Upaya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas DJKI sebagai World Class IP (Intellectual Property) Office

Pembangunan Data Base Kekayaan Intelektual Komunal

Sebagai negara megadiversity, Indonesia memiliki keragaman budaya dan sumber daya alami maupun sumber daya manusia dari segi budaya dengan berbagai produk unggulan yang harus dipertahankan kualitasnya. Perlindungan hukum menjaga produk-produk khas yang bermutu sehingga kualitas dan reputasinya tetap terpelihara. Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapat amanah menjalankan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berdikari melalui sektor Kekayaan Intelektual yang berdasarkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, yaitu pada Program Pembangunan Data Base Kekayaan Intelektual Komunal.

Upaya terkait peningkatan pemahaman dan kesadaran akan urgensi perlindungan KI

dilakukan juga melalui beberapa skema misalnya melalui kegiatan sosialisasi, diseminasi informasi akan pentingnya perlindungan KI serta kegiatan sejenis lainnya seperti drafting paten dan desain industri, membangun IP Academy, serta aktif mengikuti dan berpartisipasi dalam forum internasional. **IP Academy (Intellectual Property Academy)** sendiri merupakan salah satu bagian dari struktur organisasi IP Office yang bertujuan untuk memperdalam dan menyebarkan informasi dan/atau pengetahuan dan meningkatkan kapabilitas masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dalam bidang perlindungan, eksploitasi, dan manajemen kekayaan intelektual. Melalui IP Academy DJKI ini, akan disiapkan IP Course atau program seperti sertifikasi kekayaan intelektual untuk lulusan pasca sarjana, workshop, dan seminar, serta forum pertemuan dengan melibatkan peserta dari unsur bisnis, kreatif, teknologi, dan sektor publik (professional). Selain

itu, direncanakan akan bekerjasama dengan WIPO dalam meluncurkan program IP short course yang diikuti oleh professional dari Negara-negara lain sebagai perwakilan dari IP Offices. Di samping hal tersebut, perencanaan ke depan IP Academy DJKI dapat menjalankan program dan kurikulum yang telah disusun bekerjasama dengan DIKTI berupa “Master IP dan Manajemen Inovasi” yang bekerjasama dengan Universitas-universitas di Indonesia dan dengan IP Academy di negara-negara lainnya (misal dalam forum IP Academy Working Group ASEAN).

Kiranya kesemua langkah-langkah tersebut akan menjadi strategi bagi DJKI dalam menjawab tantangan kedepan serta sebagai pengukuhan atas pentingnya peranan KI sebagai aset bagi pendorong ekonomi bangsa.

Upaya Perbaikan Pelayanan yang Telah Dilakukan DJKI 2015-2019

Era Revolusi Industri 4.0 memiliki perubahan yang tidak bergerak secara linear namun bergerak secara eksponensial. Artinya, perubahan disruptif seperti ini telah meredefinisikan peranan organisasi publik, tidak terkecuali Pemerintahan. Bahkan secara khusus Revolusi Industri 4.0 telah ‘memaksa’ pemerintah HARUS mau ber-TRANSFORMASI dan berbenah diri. Pemerintah jika tidak ingin tergerus dan tetap survive dalam peranan sebagai ‘pengatur’ sekaligus ‘pelayan publik’ yang baik mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan warga masyarakatnya. Proses adaptasi tersebut terkait dengan cara-cara baru untuk berkolaborasi dengan warga masyarakatnya. Cara-cara baru tersebut yang paling menonjol adalah pada penggunaan Teknologi Digital dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Perbaikan pelayanan di bidang Kekayaan Intelektual yang telah dilakukan oleh DJKI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak 2015-2019 terutama terkait dengan infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai pendukung utama dalam memberikan layanan publik di bidang KI.

Upaya perbaikan infrastruktur terutama dilakukan pada:

1. Layanan Loker KI yang sudah mengakomodir penataan loket yang ramah publik dan nyaman, serta dilengkapi fasilitas online yang menunjang permohonan KI;

2. Renovasi Ruangannya Pemeriksa Sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas.

Perubahan Pasca Reformasi Loker, Fasilitas dan Penataan Ruangan Pemeriksa

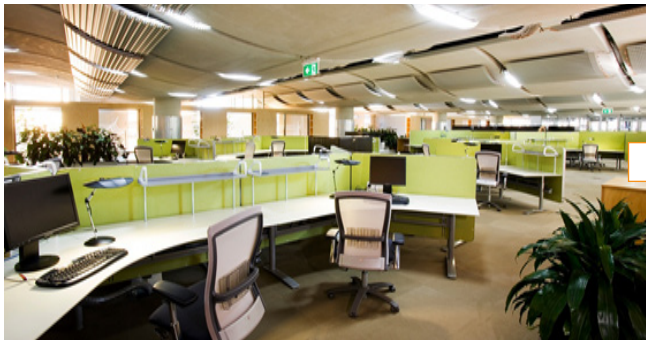
Sebelum



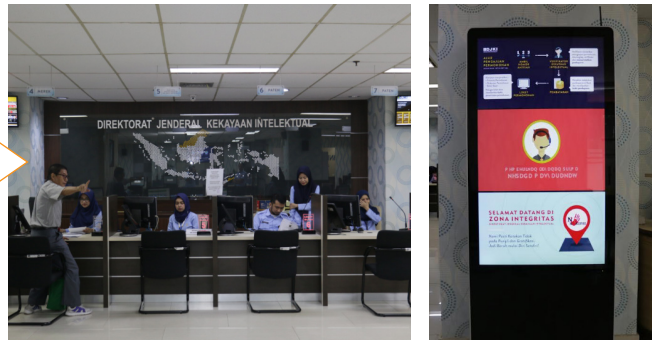
Sesudah



sebelum



Sesudah



Sedangkan pada penggunaan optimalisasi Teknologi Informasi pada layanan KI telah tercatat sebagai berikut.

2015	2016	2017	2018	2019
<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran e-HakCipta • Peluncuran Perpanjangan Merek • Pembangunan Database <i>Mirroring</i> • Pengembangan <i>Annuity</i> Paten • Peluncuran e-Status HKI • Berpartisipasi dalam WIPO CASE sebagai <i>Accessing Office</i> • WIPO Global Brand Database 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Loker Terpadu dibawah Direktorat TIKI • Digitalisasi Dokumen Permohonan • Peluncuran e-Filing Paten, Merek, Desain (Konsultan) • Upgrade IPAS 3.1.1 dan WIPO Publish • <i>Data Exchange</i> ke WIPO Global Design Database 	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran e-Filing paten, Merek, Desain untuk KANWIL, Sentra KI, Lembaga Litbang • Join ke Madrid System • Upgrade IPAS ke 3.3.1+ <i>Madrid Module</i> • Peluncuran Pangkalan Data Kekayaan Intelektual • Peluncuran Pusat Data Nasional KIK • Menggunakan Tanda Tangan Elektronik BSSN • Data Exchange ke ASEAN Design View • Pembelian <i>Exadata & Storage</i> EDMS 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima Permohonan Madrid OO dan DCP • Pengembangan IPROLine Merek • Peluncuran e-HakCipta untuk Publik dengan <i>Digital Signature</i> • Website e-Pengaduan HK • Sertifikat Paten, Merek, Desain dengan <i>Digital Signature</i>. • Peluncuran Indigeo • Peluncuran e-SAKI • Peluncuran SIMPAKI • Menjadi Host Country ASEAN <i>PatentScope</i> dan ASEAN GI Database • <i>Data Exchange</i> ke Pusdatin dan SINTA Kemernistekdikti 	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran IPROLine Merek • Peluncuran IPROLine Paten • Peluncuran IPROLine Desain • Penerbitan TTE baru dari BSSM • Peluncuran Sipengadu • Penambahan <i>Storage</i> • Peluncuran e-Pengaduan Mobile • Data Exchange ke SINGAHKI Bareskrim • Pengembangan SIMPAKI

Perkembangan capaian optimalisasi penggunaan system IT di DJKI ini telah dimulai pada tahun 2015 dengan perencanaan pengembangan layanan front office dan back office, dimana sebelum tahun 2015 seluruh permohonan Ki yang masuk dilakukan secara manual melalui loket DJKI atau Kanwil Kemenkumham. Pada tahun 2015 diinisiasi dengan peluncuran system front office e-Hak Cipta dan e-renewal merek dimana aplikasi ini diberlakukan hanya untuk penerimaan permohonan cipta dan perpanjangan merek namun system back office permohonan masih dilakukan secara manual yang memerlukan penyelesaian waktu yang cukup lama.

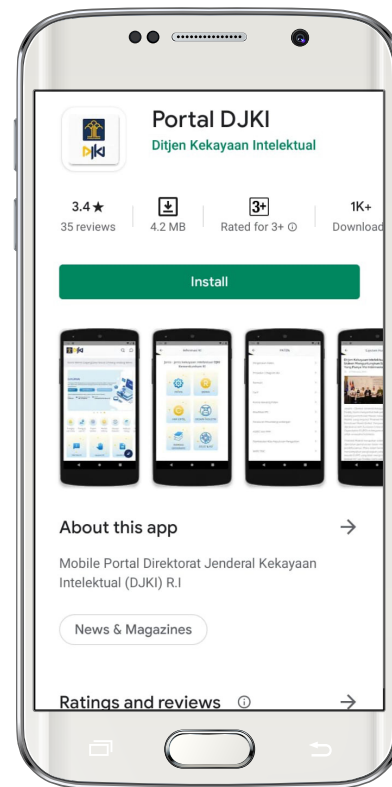
Pada tahun 2016 seiring dengan pengembangan system front office dan backoffice untuk permohonan Merek, Paten dan desain industry yang diluncurkan baru kepada para konsultan, dilakukan juga migrasi data permohonan manual ditahun-tahun sebelumnya kedalam system back office baru yaitu IPAS 3.1.1 namun dengan keterbatasan akses system backoffice oleh para pemeriksa.

Selanjutnya pada tahun 2017 pengembangan system front office permohonan paten, merek, dan DI dikembangkan kepada stakeholder HKI yaitu Kantor Wilayah Kemenkumham, Sentra HKI yang telah mendaftarkan ke DJKI, dan Lembaga Litbang. Serta dibangun system back office untuk permohonan merek madrid protocol. Selain itu pengembangan system front office untuk KI Komunal juga telah dibangun berdasarkan Peremenkumham nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang dapat diakses oleh Kantor Wilayah Kemenkumham.

Pada tahun 2018 kemudian dikembangkan system front office dan back office e-hakcipta dengan teknologi kriptografi dan pemberian akses permohonan kepada seluruh masyarakat, yang memberikan pelayanan pencatatan hak cipta dalam waktu 1 hari, inovasi ini memberikan dampak yang signifikan baik dalam penggunaan system IT oleh stakeholder HKI maupun kepada jumlah pemohon ciptaan secara keseluruhan.

Pada tahun 2019 diluncurkanlah system front office IPROLINE sebagai system permohonan paten, merek,

Tampilan pada Google Playstore



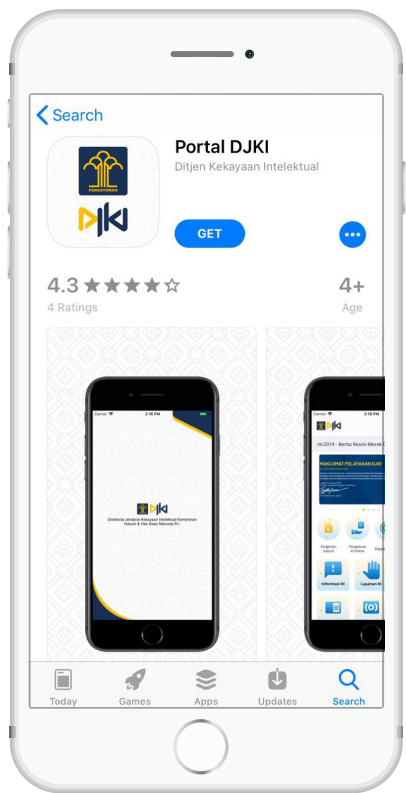
dan DI yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sementara untuk system Back Office Iproline masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut pada tahap permohonan formalitas dan pemeriksaan substantif HKI. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh DJKI secara massif untuk mengintensifkan penggunaan TI dalam peningkatan layanan publiknya adalah dengan melakukan launching permohonan layanan online ebagi seluruh rezim KI seperti yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2019 bertepatan dengan momen perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-74. Adapun layanan KI online tersebut adalah permohonan Merek, baik permohonan baru dan perpanjangan (IPROLine Merek Online – merek.dgip.go.id) , permohonan pencatatan Hak Cipta (Hak Cipta online – e-hakcipta.dgip.go.id), permohonan Desain Industri (IPROLine Desain Industri Online – desainindustri.dgip.go.id), permohonan Indikasi Geografis (Indikasi Geografis Online – ig.dgip.go.id), serta permohonan Paten (IPROLine Paten Online – paten.dgip.go.id).

Dengan perkembangan teknologi informasi yang selalu meningkat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang selalu up to date pada bulan Desember 2019 melakukan pembangunan portal web DJKI berbasis android, tampilan mobile portal DJKI menggunakan HP android melakukan download melalui Google Playstore. Sedangkan untuk pembangunan Portal DJKI berbasis iOS tampilan mobile portal DJKI menggunakan Iphone melakukan download melalui Appstore.

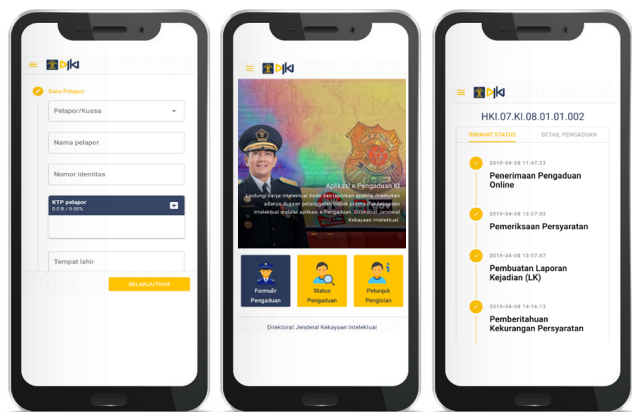
Selain itu khusus terkait dengan optimalisasi penerimaan laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran Hak atas KI juga telah bisa tersampaikan melalui aplikasi online yang juga diluncurkan pada 17 Agustus 2019 lalu yaitu aplikasi E-Pengaduan (Sipengaduan – layanan aduan atas layanan publik kekayaan intelektual) selain juga DJKI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa masih menerima pengaduan secara langsung ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Kesemua langkah tersebut diharapkan sebagai langkah dalam menjadikan penggunaan Teknologi Informasi yang intens dan masif sehingga dapat mendukung kinerja yang lebih nyata dan mendukung asas-asas dari Tata Kelola Pemerintahan yang baik seperti transparan, akuntabel, dan ‘user friendly’ dekat dengan masyarakat. Pada tahun 2019, DJKI mengajukan pembuatan aplikasi pengaduan dugaan tindak pidana pelanggaran KI berbasis Android dan IOS sebagai salah satu Target Kinerja DJKI.

No	Pekerjaan	Keterangan Singkat
1	Aplikasi e-Pengaduan berbasis Android	Aplikasi akan dibuat agar bisa berjalan diatas platform android. Segala sesuatunya akan disesuaikan dengan kebutuhan platform tersebut sehingga aplikasi bisa berjalan dengan baik diatas platform android
2	Aplikasi e-Pengaduan berbasis IOS	Aplikasi akan dibuat agar bisa berjalan diatas platform ios. Segala sesuatunya akan disesuaikan dengan kebutuhan platform tersebut sehingga aplikasi bisa berjalan dengan baik diatas platform ios
3	Integrasi data antara aplikasi e-Pengaduan berbasis Andoird dan IOS dengan backend aplikasi Penyidikan	Akan dibuatkan sebuah API agar aplikasi e-pengaduan berbasis Android dan IOS dapat mengambil data dari backend dan dapat memasukan data kedalam aplikasi backend Penyidikan

Tampilan pada Appstore



Berikut adalah hasil pengembangan aplikasi e-pengaduan dengan penambahan fitur penelusuran status penanganan



Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Kekayaan Intelektual Dan Realisasi Anggaran DJKI

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sektor penerimaan negara yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk di dalamnya kekuasaan atau kewenangan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan penerimaan negara. Penerimaan negara ini dapat berasal dari hasil pemberian fasilitas atau ijin kepada kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penerimaan jenis ini berada di berbagai Kementerian/Lembaga tergantung pada tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang menghasilkan PNBP melalui layanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual. Dapat dikatakan dari rentang tahun anggaran 2015-2019 terdapat fluktuasi kenaikan dan penurunan dari penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2016 dapat dikatakan memiliki realisasi penerimaan PNBP dengan jumlah persentase tertinggi yaitu 167,84% dari yang ditargetkan untuk diterima, namun dari segi jumlah nominal maka tahun 2019 adalah realisasi penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual tertinggi yaitu sebesar Rp. 714.606.483.255, 00 (tujuh ratus empat belas miliar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau sekitar 142,92% dari target PNBP tahun 2019 Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Namun jika dibandingkan tahun 2018, maka terjadi kenaikan signifikan di tahun 2019 yaitu sekitar 143,40% kenaikan. Sedangkan di tahun 2020 ditargetkan penerimaan PNBP sejumlah Rp. 525.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar rupiah). Adapun rincian dari realisasi penerimaan PNBP DJKI atas layanan KI selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Estimasi	Penerimaan	Persentase
1	Merek dan Indikasi Geografis	Rp.273.324.000.000,00	Rp.227.551.404.805,00	83,6%
2	Paten, DTLST dan Rahasia Dagang	Rp.219.746.050.000,00	Rp.465.345.576.250,00	211,65%
3	Hak Cipta dan Desain Industri	Rp.6.929.950.000,00	Rp.19.877.402.200,00	286,07%
4	Sertifikat	0	Rp.1.832.100.000,00	0,24%
Jumlah		Rp.500.000.000.000,00	Rp.714.606.483.255,00	142,92%

Selama tahun anggaran 2019 telah terlaksana penyerapan anggaran sejumlah 93,19% dari alokasi DIPA anggaran program penyelenggaraan Kekayaan Intelektual. Persentase penyerapan tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018 yang masih mencapai 89,77%. Sedangkan di tahun 2017 penyerapan anggaran mencapai 94,70% dan di 2016 mencatatkan penyerapan anggaran sebesar 90,39%, jumlah ini naik dari realisasi anggaran tahun sebelumnya yang mencapai 85,93%. Secara umum terdapat fluktuasi penyerapan anggaran selama periode 5 tahun terakhir. Kemampuan DJKI dalam menyerap anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal.

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
2015	Rp. 143.043.103.000,00	Rp 122.914.521.924,00	85,93%
2016	Rp. 159.029.987.000,00	Rp. 145.617.498.541,00	90,39%
2017	Rp. 174.154.874.000,00	Rp. 164.925.184.209,00	94,70%
2018	Rp. 261.845.006.000,00	Rp. 235.068.949.520,00	89,77%
2019	Rp. 275.241.752.000,00	Rp. 256.501.331.382,00	93,19%

TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
2014	Rp288.900.000.000	Rp289.421.451.405	100.18
2015	Rp309.000.000.000	Rp346.585.263.624	112.16
2016	Rp329.070.000.000	Rp662.216.633.528	167.81
2017	Rp350.000.000.000	Rp460.439.168.564	131.55
2018	Rp461.654.000.000	Rp498.327.615.005	107.94
2019	Rp500.000.000.000	Rp714.606.483.255	142.92

Peningkatan Peran Kantor Wilayah dalam Mendorong Permohonan Kekayaan Intelektual

Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, khususnya pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada awalnya adalah sebagai perpanjangan DJKI yang terbatas pada penerimaan permohonan KI dan pemberian bantuan layanan hukum terkait HKI. Pada awalnya pengadministrasian dan pengelolaan KI bersifat sentralistik, namun pendaftaran KI dapat pula dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, sehingga proses awal pendaftaran dapat terbantu. Dalam kaitan ini, peran Kanwil hanya menerima dokumen pendaftaran dan memberikan bukti awal permohonan pendaftaran. Karena tidak harus datang sendiri ke DJKI di Jakarta, maka pendaftaran melalui Kanwil dinilai lebih murah. Seiring dengan kebutuhan untuk lebih memaksimalkan manfaat sistem KI, Maka peran Kanwil perlu ditingkatkan untuk dapat membantu pengembangan lebih lanjut dan komersialisasi KI. Seiring dengan peningkatan permohonan KI dan melihat potensi di wilayah maka dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2018, telah terdapat perubahan struktural dalam Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan adanya Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berdiri sendiri, dimana

sebelumnya Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menjadi satu dengan Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Adanya struktur baru setingkat eselon IV untuk pelayanan kekayaan intelektual di wilayah ini tentunya merupakan langkah maju dalam upaya meningkatkan peran kantor wilayah dalam mendorong peningkatan permohonan kekayaan intelektual, melalui tugasnya untuk penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

Dibentuknya Subbidang khusus pelayanan kekayaan intelektual ini merupakan salah satu langkah penataan organisasi yang dilakukan melalui reposisi unit kerja sesuai kajian kebutuhan dengan tujuan penajaman tugas dan fungsi untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan. Melalui Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual ini, tentunya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Salah satu kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah menjadikan kantor wilayah sebagai “Agen Diseminasi” sesuai dengan grand design diseminasi kekayaan intelektual yang akan dirumuskan oleh Ditjen KI dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas pelayanan dan pentingnya kekayaan intelektual.



Statistik Kinerja DJKI

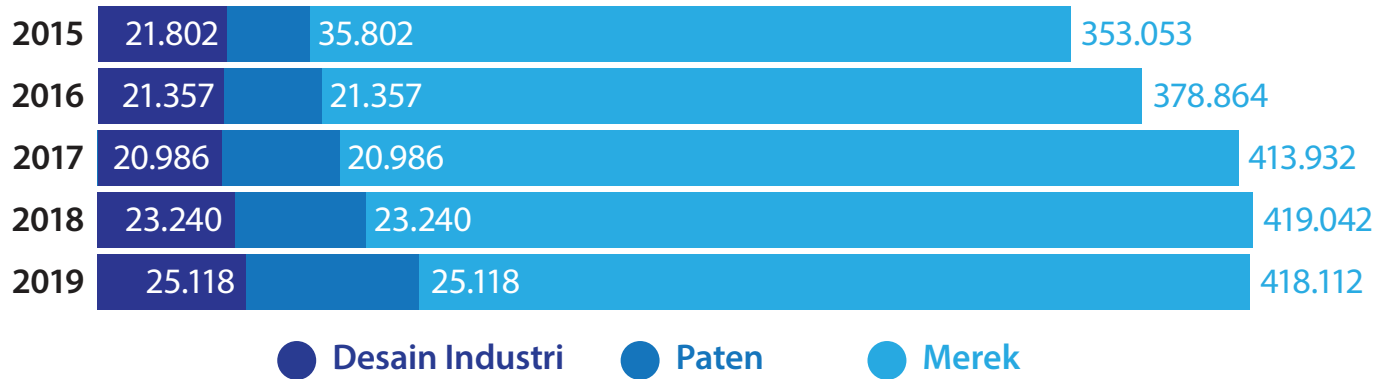
Permohonan dan Pelindungan HKI di Indonesia 2015-2019

a. Permohonan dan Pelindungan HKI

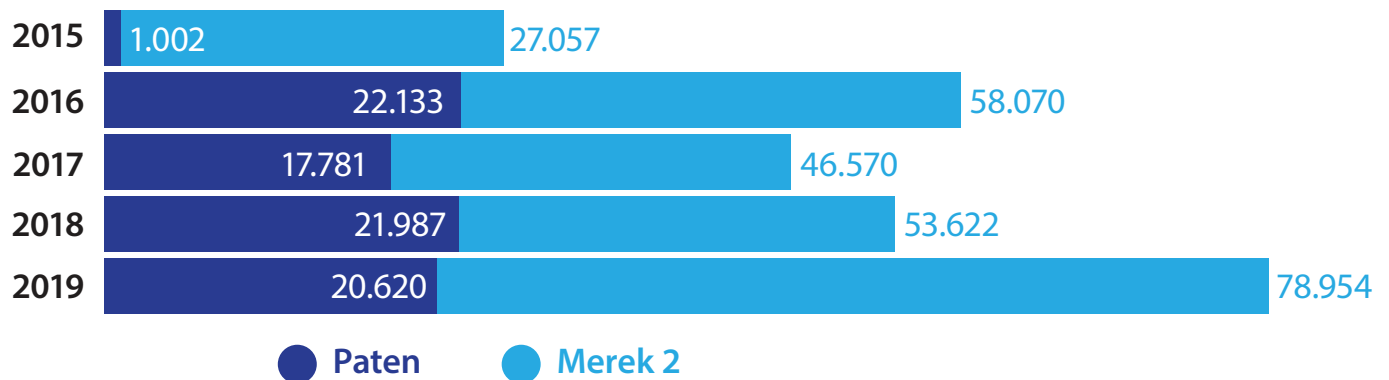
JENIS KI		PERMOHONAN MASUK PADA TAHUN TERTERA					PELINDUNGAN MASUK PADA TAHUN TERTERA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
HAK CIPTA	TOTAL	6.154	7.553	19.220	35.105	48.069	-	-	4.927	31.288	42.836
	LUAR NEGERI	27	15	467	276	139	-	-	148	218	116
	DOMESTIK	6.127	7.538	18.753	34.829	47.930	-	-	4.779	31.070	42.720
DESAIN INDUSTRI	TOTAL	3.909	3.847	3.641	3.800	4.363	3.345	2.831	2.664	3.306	4.111
	LUAR NEGERI	1.284	1.320	1.322	1.368	1.528	1.438	1.279	1.192	1.352	1.805
	DOMESTIK	2.625	2.527	2.319	2.432	2.835	1.907	1.552	1.472	1.954	2.306
PATEN	TOTAL	8.874	9.236	9.798	11.302	12.606	2.729	3.709	5.317	6.701	11.203
	LUAR NEGERI	7.572	7.765	7.527	8.460	8.430	2.502	3.302	4.738	5.904	9.899
	DOMESTIK	1.302	1.465	2.267	2.839	4.175	227	407	579	797	1.304
	PCT Application entering National Phase	-	6	4	3	1	-	-	-	-	-
MEREK	TOTAL	61.790	65.363	68.368	74.173	90.879	64.240	21.991	54.913	26.298	26.744
	LUAR NEGERI	15.492	15.994	16.466	12.741	12.245	18.061	5.854	15.922	7.014	5.925
	DOMESTIK	46.298	49.369	51.902	56.575	69.004	46.179	16.137	38.991	19.284	16.893
	Application filed under MADRID PROTOCOL	-	-	-	4.857	9.630	-	-	-	-	3.926
INDIKASI GEOGRAFIS	TOTAL	-	7	12	-	-	8	16	9	15	13

b. HKI yang dilindungi hingga tahun 2015-2019

REGISTRATIONS IN FORCE IN INDONESIA (HKI yang masih berlaku hingga tahun tertera)

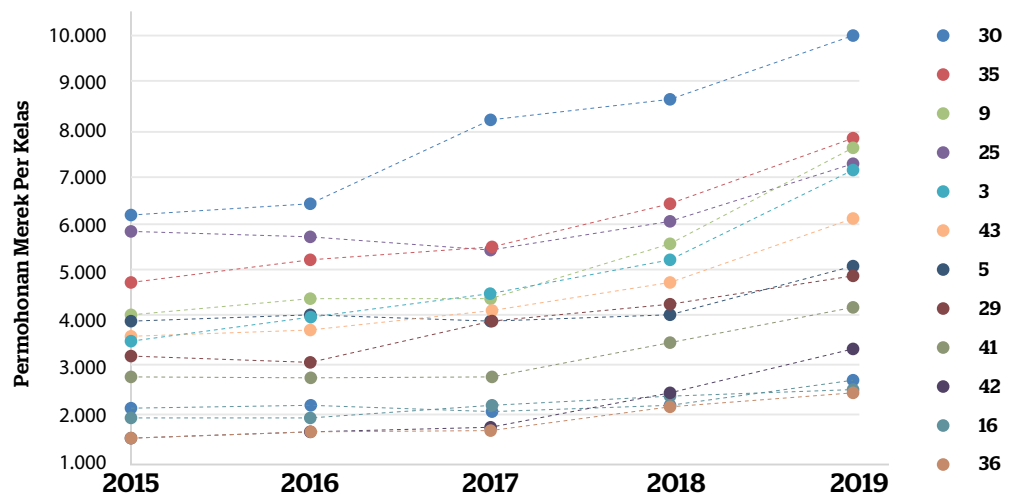


RENEWALS FILED IN INDONESIA (permohonan yang diperpanjang dan dipelihara pada tahun tertera)



c. Permohonan HKI perkelas dan Jenis Merek

Pertumbuhan merek di Indonesia dari tahun 2015-2019 yang didominasi oleh pertumbuhan merek pada jenis produk kopi, teh, coklat, gula, beras, dan bubuk-bubuk an (kelas 30) kemudian pada kelas jasa pada sektor advertisement, photography, dan cinematografi (kelas 35 dan 9).

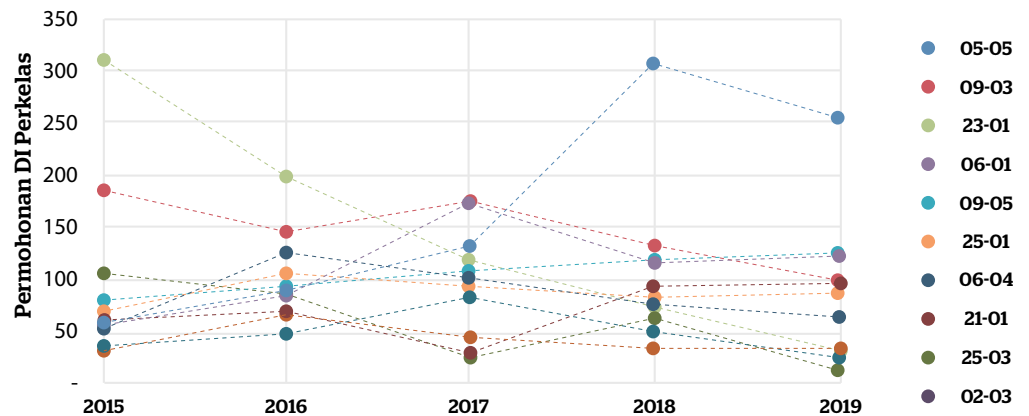


Top 10 Kelas Permohonan Merek tahun 2019

Pemohonan Keseluruhan		Pemohonan Indonesia	
Class	Number	Class	Number
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, powder	10.055	Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, powder	8.958
Advertising	7.872	Clothing, footwear, headgear	5.885
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic etc	7.632	Services for providing food and drink	5.267
Clothing, footwear, headgear	7.303	Advertising	5.252
Cleaning preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics etc	7.234	Cleaning preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics etc	5.119
Services for providing food and drink	6.147	Meat, fish, poultry and game	4.173
Pharmaceutical and veterinary preparations etc	5.052	Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic etc	3.586
Meat, fish, poultry and game	4.946	Pharmaceutical and veterinary preparations etc	3.307
Education	4.224	Education	2.816
Scientific and technological services and research and design relating thereto etc	3.279	Beers	1.848

Desain Industri

Pertumbuhan desain industri di Indonesia dari tahun 2015-2019 per jenis kelasnya menunjukkan adanya pertumbuhan pada kelas desain pada bahan tekstil, dan desain pada tempat penampungan dengan berbagai jenis bahan. Namun pada tahun 2015-2019 terjadi penurunan pada sebagian besar kelas permohonan desain industri di Indonesia.

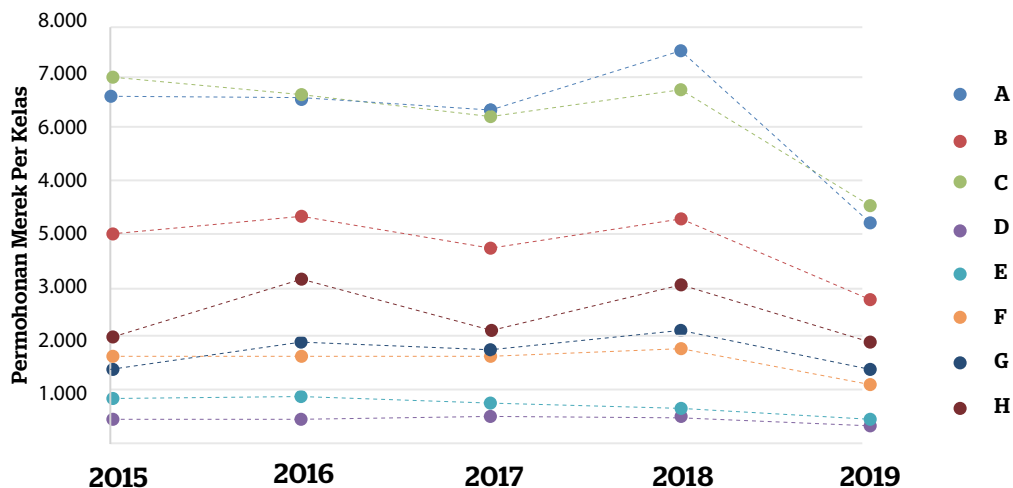


Top 10 Permohonan Kelas Desain Industri 2019

Pemohonan Keseluruhan		Pemohonan Dalam Negeri	
Class	Number	Class	Number
Textile fabrics	258	Textile fabrics	258
Bottles, flasks, pots, carboys, demijohns, and containers with dynamic dispensing means	154	Bottles, flasks, pots, carboys, demijohns, and containers with dynamic dispensing means	124
Beds and seats	125	Beds and seats	122
Boxes, cases, containers, (preserve) tins or cans	125	Storage furniture	97
Parts, equipment and accessories for vehicles, not included in other classes or subclasses	122	Boxes, cases, containers, (preserve) tins or cans	97
Bags, sachets, tubes and capsules	101	Bags, sachets, tubes and capsules	93
Storage furniture	97	Building materials	65
Communications equipment, wireless remote controls and radio amplifiers	92	Footwear, socks and stockings	48
Fluid distribution equipment	87	Parts, equipment and accessories for vehicles, not included in other classes or subclasses	38
Building materials	71	Jewellery	34

Patent

Pertumbuhan permohonan paten di Indonesia didominasi oleh produk paten pada rekayasa kebutuhan dasar manusia dan rekayasa metalurgi dan produk-produk kimia seperti obat-obatan.



Class	International Patent Classification
A	Human Necessities
B	Performing Operations; Transporting
C	Chemistry; Metallurgy
D	Textiles; Paper
E	Fixed Constructions
F	Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting
G	Physics
H	Electricity

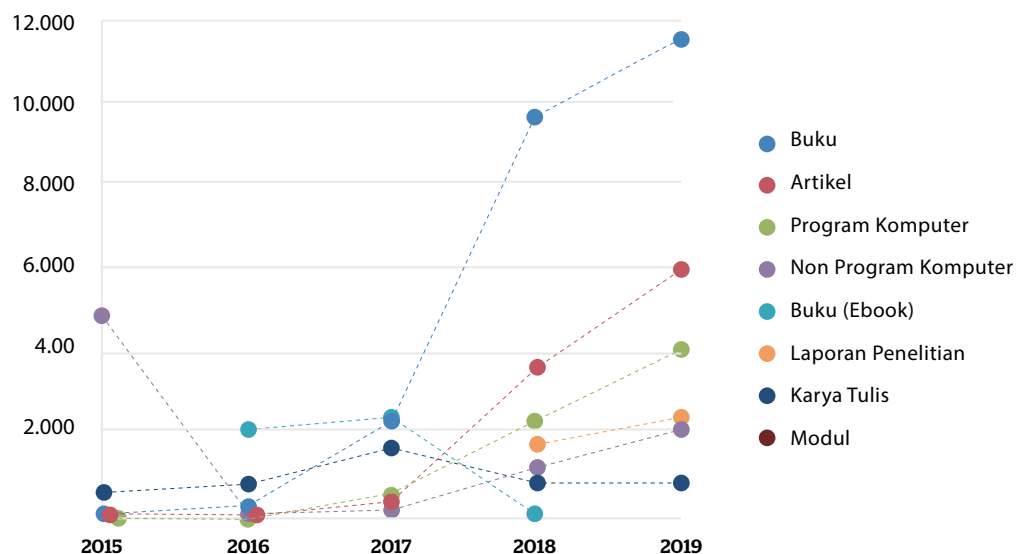
Hak Cipta

Permohonan pencatatan Hak Cipta mengalami peningkatan secara signifikan semenjak diterapkannya e-Hakcipta yang memberikan pelayanan dalam 1 hari pada tahun 2018.

Permohonan meningkat dari 11.000 permohonan dalam satu tahun menjadi 30.000 permohonan di akhir tahun 2018.

Permohonan pencatatan hak cipta di Indonesia

didominasi oleh karya tulis baik buku, artikel, laporan dan juga diikuti oleh pertumbuhan perlindungan program-program perangkat lunak. Terdapat kesenjangan yang cukup jauh dalam pencatatan hak cipta untuk karya seni dalam bentuk lagu maupun lukisan dan karya seni lainnya.



Statistik Provinsi Permohonan Kekayaan Intelektual 2019

Provinsi	2019				
	Cipta	Desain Industri	Indikasi Geografis	Merek	Paten
Aceh	207			67	18
Bali	554	18		518	14
Bangka Belitung	17			39	
Banten	634	105		2.085	16
Bengkulu	130	1		7	
Gorontalo	92			4	1
Jakarta	3.054	660		12.448	291
Jambi	90	4	1	41	1
Jawa Barat	3.755	150		3.004	280
Jawa Tengah	1.536	234		1.621	117
Jawa Timur	2.977	102		2.303	131
Kalimantan Barat	140	2		88	8
Kalimantan Tengah	10			2	
Kalimantan Timur	187	3		121	9
Kalimantan Utara	14			4	
Kepulauan Riau	63	1		180	2
Lampung	228	28		125	5
Maluku	36	1		90	10
Maluku Utara	22			2	2
Nusa Tenggara Barat	228			37	13
Nusa Tenggara Timur	58			45	9
Papua	79			10	
Papua Barat	27			3	
Riau	362	1		61	16
Sulawesi Selatan	892	7		195	24
Sulawesi Tengah	55	3		35	9
Sulawesi Tenggara	117			8	20
Sulawesi Utara	143			31	18
Sumatera Barat	513	2	1	223	86
Sumatera Selatan	225	3		92	16
Sumatera Utara	742	23		945	33
Yogyakarta	1.841	11		633	84

Sebaran Kekayaan Intelektual Yang Didaftarkan Oleh Kementerian

Desain Industri

Nama Lembaga	Jumlah
Badan Ekonomi Kreatif	16
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	3
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	3
Sentra Kekayaan Intelektual Kementerian Kelautan dan Perikanan	1

Patent

Nama Lembaga	Jumlah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	226
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	87
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	71
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	20
Sentra Kekayaan Intelektual Kementerian Kelautan dan Perikanan	17
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10
PUSLITBANG KETENAGALISTRIKAN	19
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	8
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO	8
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	8
Pusat Litbang Sumber Daya Air	5
PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN	5
Badan Standardisasi Nasional	4
Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia	4
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan	3
Badan Informasi Geospasial	2
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR	1
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU	1
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan	1
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	1
Pusat Penelitian Karet	1
YAYASAN LEMBAGA SUMBER DAYA KOMBINASI INDONESIA (INDONESIAN COMBINE RESOURCES INSTITUTION FOUNDATION)	1

Trademark

Nama Lembaga	Jumlah
BADAN EKONOMI KREATIF	7
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	2
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	2
YAYASAN ADVOKASI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YALPK)	2
BADAN USAHA MILIK DESA SUBUR MAKMUR	1
BADAN PENGELOLA AIR MINUM KABUPATEN BANTUL	1
Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syiah Kuala	1
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL	1
BADAN USAHA MILIK DESA SEKAR WANGI	1
BUEKA BSA Kedungmutih (Badan Usaha Ekonomi 'Aisyiyah Balai Sakinah' Aisyiyah Kedungmutih)	1
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian	1
LEMBAGA ELTI GRAMEDIA	1
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	1
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	1
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya (UNESA)	1
Lembaga Pengembangan Dakwah AL-BAHJAH	1
PERKUMPULAN LEMBAGA PELATIHAN PROFESI PATRIOT BANGSA	1
Persek. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia	1
Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia	1
Pusat Penelitian Karet - PT Riset Perkebunan Nusantara	1
YAYASAN BADAN RUMAH SAKIT GEREJA KRISTEN PASUNDAN (YBRS-GKP)	1







DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.